



LAPORAN TAHUNAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI TAHUN
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Tahunan merupakan bagian dari laporan berkala yang wajib disampaikan yang menyajikan data kondisi dan potensi serta pencapaian hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan melalui dukungan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kami menyadari penyajian Laporan Tahunan ini masih banyak kekurangan –kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan dalam penyempurnaan dan perbaikan untuk kedepannya. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tahunan ini disampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus diminta agar supaya dapat mempertahankan kerjasama yang baik dan sekaligus dapat meningkatkan partisipasinya di tahun mendatang. Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai, memberkahi usaha dan pengabdian kita terhadap Nusa dan Bangsa.

Kepala Kantor

Jufrihadi, SKM, M.Kes
NIP. 196903301991031002

DAFTAR ISI

BAB I ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN	4
BAB II TUJUAN DAN SASARAN KERJA	9
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN	13
BAB IV HASIL KERJA	21
BAB V PENUTUP	77

BAB I

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

1. Hambatan Tahun Lalu

Pada Substansi PK dan SE (PKSE) telah cukup berhasil namun di dalam prosesnya menemui hambatan diantaranya :

- a. Belum optimalnya dukungan lintas sektor.
- b. Belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi prosedur kekarantinaan pada wilayah kerja.
- c. Keterbatasan peralatan dalam rangka deteksi dan respons kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat (KKMD) pada wilker Kantor Kesehatan Pelabuhan yang berada di perbatasan.

Pada Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) telah cukup berhasil namun di dalam prosesnya menemui hambatan diantaranya :

- a. Keterbatasan sarana prasarana pendukung dan logistik di bidang medis untuk kegiatan kesehatan.
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan lintas program/lintas sektor dalam logistik, informasi dan advokasi program.
- c. Belum tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi untuk di Kantor Induk dan wilayah kerja.

Pada Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL) telah cukup berhasil namun di dalam prosesnya menemui hambatan diantaranya :

- a. Keterbatasan sarana prasarana pendukung dan logistik di bidang sanitasi dan pengendalian vektor.
- b. Belum optimalnya partisipasi peran swasta/masyarakat dalam logistik, informasi dan advokasi program.
- c. Belum tersedianya sumber daya manusia yang mencukupi untuk wilayah kerja

Pada Subbag Adum terdapat beberapa hambatan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan *Standart Operational Procedure (SOP)* pemasukan dan pengeluaran barang baik bersumber DIPA atau transfer dari pusat.
- b. Belum semua wilayah kerja memberikan laporan bulanan tepat waktu.
- c. Belum semua wilayah kerja yang menyerahkan absensi bulanan tepat waktu sehingga memperlambat proses rekap absensi dan rekap tukin.
- d. Berkas yang masuk ke verifikator pertanggungjawaban perjalanan dinas baik dalam kota dan luar kota serta pertanggung jawaban belanja barang berkas yang masuk tidak tertib.

2. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah UPT yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Dumai dipimpin oleh Kepala. Susunan organisasi KKP terdiri atas subbagian administrasi umum; dan kelompok jabatan fungsional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, Kepala KKP dapat membentuk instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, dapat dibentuk Wilker KKP yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. Wilker KKP merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP. Wilker KKP dipimpin oleh kepala dalam jabatan nonstruktural. Kepala Wilker dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala KKP.

Di lingkungan KKP dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Wilayah Kerja KKP, yang selanjutnya disebut Wilker KKP, adalah unit kerja fungsional KKP di lingkungan pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. KKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. KKP secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai terdapat 8 (delapan) wilayah kerja sebagai berikut :

1. Pelabuhan Laut Dumai.

Pelabuhan Dumai terletak di Selat Rupat pantai Sumatera Indonesia pada posisi titik koordinat Lintang 01° 41' 14" Utara dan Bujur 101° 27' 42,1" Timur. Pelabuhan Dumai terletak di Provinsi Riau, merupakan daerah yang terkena dampak atas kerja sama bidang ekonomi antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand,

mengakibatkan pertumbuhan pada sektor industri dan pariwisata. Dalam kegiatannya Pelabuhan Dumai melayani kapal-kapal domestik dan internasional dengan berbagai jenis kapal baik kapal penumpang maupun barang. Status Pelabuhan Dumai adalah pelabuhan umum yang diusahakan dan terbuka untuk perdagangan luar negeri, dengan predikat pelabuhan kelas 1 (satu).

2. Pelabuhan Laut Bengkalis

Pelabuhan Laut Bengkalis terletak di ibukota Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Terletak di Selat Bengkalis pantai timur Sumatera. Jarak antara Pelabuhan Dumai dan Bengkalis adalah 39 mill laut atau 1,5 jam dengan perjalanan ferry yang ada saat ini. Dalam kegiatannya Pelabuhan Bengkalis melayani kapal-kapal domestik dan internasional dengan berbagai jenis kapal baik kapal penumpang maupun barang. Status Pelabuhan Bengkalis adalah pelabuhan umum yang diusahakan dan terbuka untuk perdagangan luar negeri dan dikelola oleh PT.Pelindo I dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

3. Pelabuhan Laut Bagansiapiapi

Pelabuhan Laut Bagansiapiapi terletak di Selat Barkey Pantai Timur Sumatera dan Kota Bagansiapiapi merupakan ibukota Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Jarak antara Dumai dan Bagan Siapiapi dapat ditempuh melalui laut sejauh 93 mill laut dan melalui jalan darat sejauh 135 km. Dalam kegiatannya Pelabuhan Laut Bagansiapiapi melayani kapal-kapal domestik internasional dengan berbagai jenis kapal baik kapal penumpang maupun barang. Status Pelabuhan Laut Bagansiapiapi adalah pelabuhan umum yang diusahakan dan terbuka untuk perdagangan luar negeri dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

4. Pelabuhan Laut Sungai Pakning

Pelabuhan Laut Sungai Pakning terletak di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang dapat ditempuh dengan jalan darat maupun jalan laut. Jarak dari kota Dumai ke Sungai Pakning $\pm$ 110 km dapat dicapai dengan transportasi darat dengan jaraktempuh selama 1 jam 45 menit. Dalam kegiatannya Pelabuhan Laut Sungai Pakning melayani kapal-kapal domestik internasional dengan berbagai jenis kapal baik kapal penumpang maupun barang. Status Pelabuhan Laut Sungai Pakning adalah pelabuhan umum yang diusahakan dan terbuka untuk perdagangan luar negeri dan dikelola oleh PT. Pelindo I.

5. Pelabuhan Laut Panipahan

Pelabuhan Laut Panipahan terletak di pantai timur Sumatera di kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Jarak dari Dumai ke Panipahan

adalah 102 mill, akses menuju Pelabuhan Laut Panipahan dapat ditempuh dengan transportasi air dari Pelabuhan Bagansiapiapi. Dalam kegiatannya Pelabuhan Laut Panipahan melayani kapal-kapal domestik internasional dengan berbagai jenis kapal baik kapal penumpang maupun barang. Status Pelabuhan Laut Panipahan adalah pelabuhan umum yang diusahakan dan terbuka untuk perdagangan luar negeri dan dikelola secara swadaya masyarakat.

6. Pelabuhan Laut Tanjung Medang

Pelabuhan Laut Tanjung Medang terletak di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Letaknya berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Dalam kegiatannya Pelabuhan Laut Tanjung Medang melayani kapal-kapal domestik internasional dengan berbagai jenis kapal baik kapal penumpang maupun barang. Status Pelabuhan Laut Tanjung Medang adalah pelabuhan umum yang diusahakan dan terbuka untuk perdagangan luar negeri dan dikelola secara swadaya masyarakat.

7. Pelabuhan Kawasan Industri Pelintung

Pelabuhan Kawasan Industri Pelintung terletak lebih kurang 60 km sebelah timur Kota Dumai dapat dicapai dengan transportasi darat dengan jarak tempuh selama 30 menit. Dalam kegiatannya Pelabuhan Kawasan Industri Dumai melayani kapal-kapal barang domestik dan internasional. Status Pelabuhan Kawasan Industri Dumai adalah pelabuhan khusus yang diusahakan dan terbuka untuk perdagangan luar negeri dan dikelola oleh PT. Kawasan Industri Pelintung.

8. Bandara Pinang Kampai

Bandara Pinang Kampai terletak di Selatan Kota Dumai, Provinsi Riau. Bandara ini adalah bandara domestik yang dimiliki oleh PT. Pertamina dan dikelola oleh PT. Pertamina.

3. Sumber Daya

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 38 orang, Jabatan Fungsional Umum sebanyak 12 orang dan Struktural sebanyak 2 orang.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa Brang Milik Negara (BMN) dapat dilihat dari berikut ini :

	31-Des-22	31-Des-23
Persediaan	350,862,188	354,747,396
Tanah	4,287,177,414	4,287,177,414
Peralatan dan Mesin	11,812,308,114	12,788,739,764
Gedung dan Bangunan	10,346,315,578	10,346,315,578
Irigasi	1,147,000	1,147,000
Jaringan	7,491,000	7,491,000
KDP	0	0
Software	28,500,000	28,500,000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5,483,185,370	2,708,985,370
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(9,481,053,887)	(11,598,273,106)
Akumulasi Amortisasi Software	(14,250,000)	(21,375,000)
Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(5,461,558,770)	(2,701,044,120)
Total Aset	17,360,124,007	16,202,411,296

5. Dana

DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 13.495.971.000, dengan 4249 | Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah sebesar Rp 3.466.158.000 dan 4815 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar Rp 10.029.813.000.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

1. Tujuan

KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

2. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

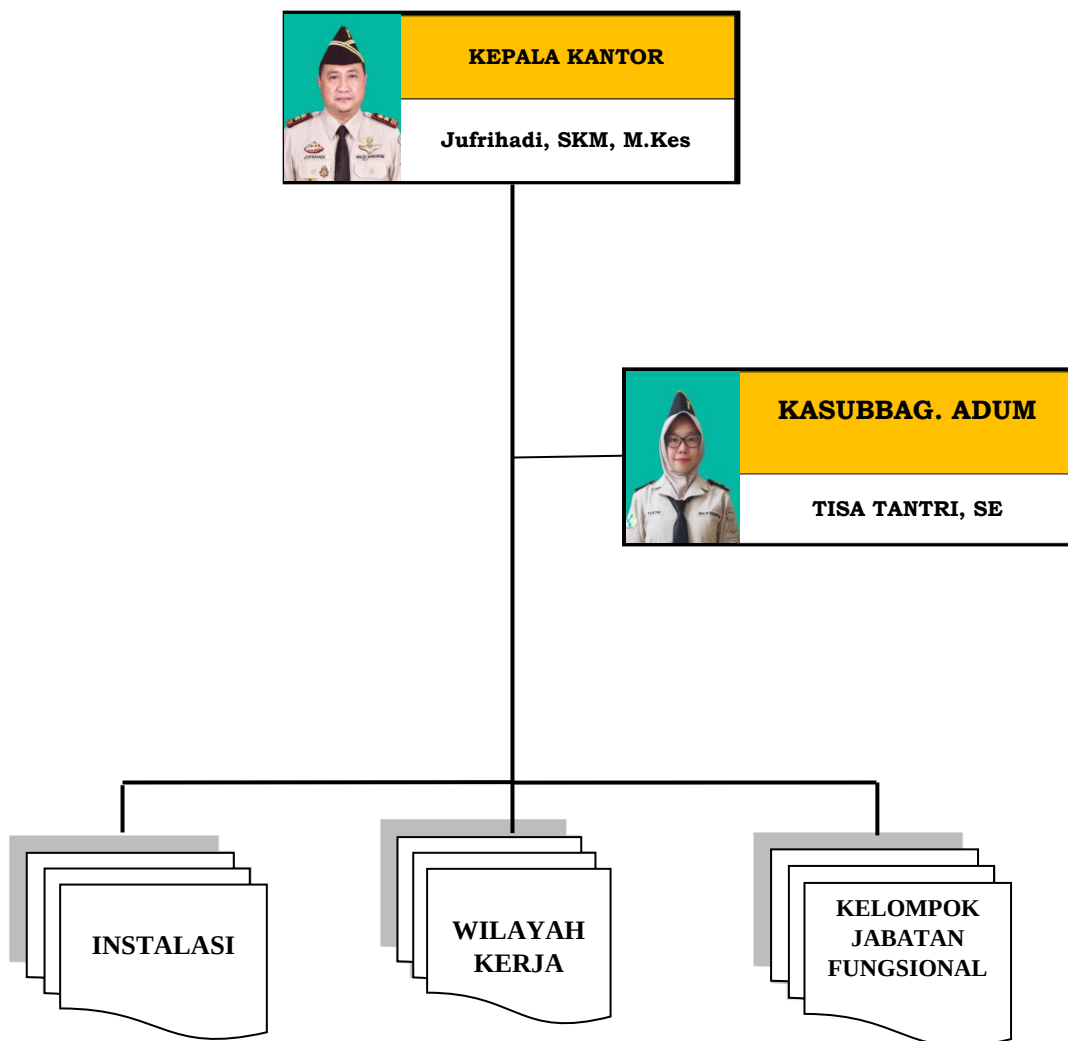
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

3. Struktur Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan menjelaskan bahwa Struktur Organisasinya Susunan organisasi KKP kelas II terdiri atas subbagian administrasi umum; dan kelompok jabatan fungsional. Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas II.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, Kepala KKP dapat membentuk instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, dapat dibentuk Wilker KKP yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. Di lingkungan KKP dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai



4. Sasaran dan Indikator

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat 2 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang terdiri 3 indikator sebagai berikut :
 - a. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN target 0,98.
 - b. Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan target 99%.
 - c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN target 0,97.
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang terdiri 5 indikator pada terdiri sebagai berikut :
 - a. Nilai Kinerja Anggaran target 86.
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran target 96.

- c. Kinerja Implementasi WBK staker target 80.
- d. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya target 90%.
- e. Persentase realisasi anggaran target 95%.

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai maka diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai sebuah strategi yang diperlukan untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditentukan.

Pada Substansi PKSE strategi dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data surveilans epidemiologi.
2. Penyelenggaraan SKD KLB.
3. Konsultasi program ke Pusat.
4. Bimbingan teknis ke wilayah kerja.
5. Peningkatan kompetensi bidang surveilans epidemiologi.
6. Pengelolaan simkespel.
7. Penanggulangan kejadian PHEIC.
8. Pemeriksaan kapal dalam karantina.
9. Penerbitan SSCC setelah dilakukan tindakan penyehatan terhadap alat angkut.
10. Penerbitan SSCEC setelah dilakukan pemeriksaan sanitasi kapal.
11. Penerbitan PHQC untuk kapal yang berangkat.
12. Pengawasan fisik dan dokumen OMKABA.
13. Penerbitan dan legalisasi dokumen ICV bagi calon haji/umroh.
14. Pengawasan lalu lintas jenazah.
15. Pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja.
16. Deteksi dini penyakit tidak menular di wilayah kerja.
17. Penyusunan SBK dan aplikasi RKAKL.
18. Pertemuan Reviu RKAKL.
19. Penyusunan DESK anggaran.
20. Revisi DIPA.

Pada UKLW strategi dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Layanan Kunjungan Poliklinik

Pelayanan kesehatan terbatas di substansi UKLW Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai adalah poliklinik induk, bandara dan wilayah kerja.

2. Pelayanan Imunisasi atau Vaksinasi

Pelayanan vaksinasi di KKP Kelas II Dumai adalah layanan vaksin meningitis meningococcus, yellow fever dan Covid 19. Sertifikat vaksinasi internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi untuk perjalanan internasional sesuai Permenkes Nomor 23 tahun 2018. Kegiatan pelayanan vaksinasi Covid 19 dilakukan di poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dan mobile di Wilayah Kerja selama masa pandemik.

3. Layanan Penerbitan Surat Izin Orang Sakit.

4. Penerbitan Surat Keterangan Sehat.

5. Layanan Deteksi Dini (Skrining)

Pelaksanaan deteksi dini HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), Tuberculosis (TB), Covid19 dan Malaria diselenggarakan dalam rangka skrining penyakit menular serta berpotensi wabah khususnya penyakit Covid19. HIV/AIDS dan IMS dilakukan secara sukarela untuk mengetahui status HIV/AIDS seseorang serta mengetahui adanya penularan HIV/AIDS di wilayah pelabuhan/ bandara yang dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Mobile VCT HIV/AIDS dilaksanakan oleh kantor induk di pelabuhan laut Dumai dan Wilayah Kerja KKP Kelas II Dumai selama Tahun 2023.

Selain itu, Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan skrining penyakit Tuberculosis (TB) dengan pemeriksaan dahak sewaktu dan pagi hari. Sasaran pemeriksaan adalah anak buah kapal, supir truk, pekerja swasta/perusahaan, pelaut, ojek pelabuhan, masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan serta pekerja formal instansi pemerintah di wilayah kerja pelabuhan. Kegiatan deteksi dini ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota setempat, sehingga diharapkan tidak ada lagi yang belum mendapatkan pengobatan.

6. Penerbitan Surat Layak Terbang

Guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit serta permasalahan kesehatan masyarakat maka diperlukan penerbitan surat laik terbang (memenuhi persyaratan yang ditentukan serta aman untuk terbang di udara). Pemberangkatan orang sakit melalui udara disyaratkan yakni tidak menderita penyakit karantina/penyakit menular tertentu, tidak ada kontradiksi dengan peraturan penerbangan, serta pasien didampingi oleh keluarga/dokter/perawat (KMK 424/Menkes/SK/IV/2007). Capaian kinerja penerbitan surat keterangan laik terbang ibu hamil pada Tahun 2023 adalah 0 orang. Hal ini karena tidak adanya jadwal penerbangan komersil selama tahun 2023 di Bandara pinang kampai Dumai. Hal ini didukung dengan adanya kerjasama antara Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dengan maskapai penerbangan. Setiap maskapai penerbangan yang penumpangnya dalam keadaan hamil oleh petugas groundhandling diantar ke konter Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai di bandara untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

7. Pelayanan penerbitan sertifikat P3K

8. Pelayanan Kegawat Daruratan Medik

9. Pelayanan Rujukan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah merujuk orang yang sakit dengan keadaan emergency/ gawat darurat ke rumah sakit. Jumlah layanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebanyak 22 layanan. ABK kapal warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing mendapat perlakuan yang sama. Kasus gawatdarurat yang tidak dapat dilakukan penanganannya di kapal harus dirujuk ke rumah

sakit dengan pemeriksaan penunjang dan dokter spesialis. Rumah sakit rujukan antara lain RSUD Kota Dumai dan RS. Pertamina Dumai.

Pada subbag adum strategi dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

A. Nilai Kinerja Anggaran target 86.

Pada pelaksanaan nilai kinerja anggaran dilakukan dengan rincian output sebagai berikut :

1. Koordinasi (35,00 kegiatan) pagu sebesar Rp 248.840.000.
 - a. Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program (6.00 kegiatan) pagu sebesar Rp 58.800.000.
 - b. Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program (17.00 kegiatan) pagu sebesar Rp 80.880.000.
 - c. Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran (10.00 kegiatan) pagu sebesar Rp 49.380.000.
 - d. Koordinasi lintas program lintas sektor hukum dan organisasi (1.00 kegiatan) pagu sebesar Rp 8.540.000.
 - e. Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum (1.00 kegiatan) pagu sebesar Rp 51.240.000.
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal (25 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit) pagu sebesar Rp 9.012.326.000.
 - a. Layanan BMN (5.00 layanan) pagu sebesar Rp 44.660.000.
 - b. Layanan Hukum (3.00 layanan) pagu sebesar Rp 9.880.000.
 - c. Layanan Hubungan Masyarakat (1.00 layanan) pagu sebesar Rp 120.000.000.
 - d. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (1.00 layanan) pagu sebesar Rp 14.000.000.
 - e. Layanan Umum (2.00 layanan) pagu sebesar Rp 26.040.000.
 - f. Layanan Data dan Informasi (1.00 layanan) pagu sebesar Rp 1.000.000.
 - g. Layanan Perkantoran (12.00 layanan) pagu sebesar Rp 9.898.964.000.
3. Layanan Manajemen SDM Internal (31,00 Orang, Layanan, Rekomendasi) pagu sebesar Rp 332.175.000.
 - a. Layanan Manajemen SDM (10.00 orang) pagu sebesar Rp 27.130.000.
 - b. Layanan Pendidikan dan Pelatihan (21.00 orang) pagu sebesar Rp 305.045.000.
4. Layanan Manajemen Kinerja Internal (17,00 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi) pagu sebesar Rp 436.472.000.
 - a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (3.00 dokumen) pagu sebesar Rp 181.980.000.
 - b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (6.00 dokumen) pagu sebesar Rp 70.780.000.
 - c. Layanan Manajemen Keuangan (7.00 dokumen) pagu sebesar Rp 128.632.000.
 - d. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (1.00 dokumen) pagu sebesar Rp 55.080.000.

B. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran target 96.

Dalam mencapai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai salah satu indikator kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja dengan target 96, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan. Dilakukan dengan melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan II. Meminimalisir revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajectory penyerapan anggaran berubah. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA.
2. Peningkatan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per Jenis Belanja per bulan dengan melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
3. Peningkatan akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan dengan . mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
4. Peningkatan penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal dengan mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan. Menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.
5. Peningkatan percepatan pembayaran belanja kontraktual dengan Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana.
6. Peningkatan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP dengan Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan. Dalam mengajukan TUP Tunai, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran. Menyetor sisa dana UP/TUP Tunai yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir. Memonitor status penggunaan UP/TUP Tunai pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detil data IKPA UP/TUP) serta mengajukan GUP ke KPPN apabila telah digunakan minimal 50% dari total UP yang dikelola.

7. Peningkatan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran dengan Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran, dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.
8. Peningkatan partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas dengan Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir). Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi. Meningkatkan koordinasi PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai untuk mencapai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang optimal sesuai target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program merupakan kegiatan koordinasi dengan kantor pusat (Ditjen P2P), Satker UPT lainnya (KKP/BTKL) dan lintas sektor terkait. Koordinasi dilakukan dalam bentuk tatap muka maupun virtual melalui media zoom meeting untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan terkait perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit serta program dukungan manajemen satker.
2. Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program merupakan kegiatan koordinasi dengan kantor pusat (Ditjen P2P), Satker UPT lainnya (KKP/BTKL) dan lintas sektor terkait. Koordinasi dilakukan dalam bentuk tatap muka maupun virtual melalui media zoom meeting untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan terkait evaluasi program.
3. Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran dilakukan dalam rangka pemutakhiran dan penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan keuangan dan anggaran pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai, bisa dalam bentuk Penyelesaian Permasalahan Keuangan dan Anggaran ke Kanwil DJPb Riau, koordinasi dalam rangka Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN dengan KKP LK wilayah, dan konsultasi keuangan dan BMN ke pusat.

C. Kinerja Implementasi WBK staker target 80.

Hasil dari kegiatan dalam rangka pembangunan zona integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah tersusunnya rencana kegiatan dalam rangka pembangunan zona integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Monitoring : Seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Evaluasi : Keterlibatan pegawai dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM agar dimonitor setiap bulannya.

Rencana Tindak Lanjut : Memonitor keterlibatan seluruh pegawai dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM setiap bulan.

2. Penataan Tata Laksana

Monitoring : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik sudah dilakukan.

Evaluasi : Pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara bertahap telah dilaksanakan.

Rencana Tindak Lanjut : Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik bulan selanjutnya.

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Monitoring : Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah dilakukan, jabatan yang mengikuti pelatihan telah memenuhi syarat.

Evaluasi : Untuk mengetahui perkembangan kompetensi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai, dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya.

Rencana Tindak Lanjut : Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai setiap bulan.

4. Penguatan Akuntabilitas

Monitoring : Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan hasilnya telah diinput ke dalam aplikasi e-performance Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai, capaiannya sesuai target yang ditetapkan.

Evaluasi : Pencapaian kinerja dari indikator kegiatan yang telah ditetapkan perlu dilakukan monitoring setiap bulannya untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan tercapai.

Rencana Tindak Lanjut : Melakukan monitoring pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai setiap bulan.

5. Penguatan Pengawasan

Monitoring : Media sosialisasi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sudah ada meskipun sebagian kecil.

Evaluasi : Memperbanyak media sosialisasi tentang SPIP di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.

Rencana Tindak Lanjut : Meningkatkan dan memperbanyak media sosialisasi tentang SPIP di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Monitoring : Sosialisasi pelayanan prima sudah pernah dilaksanakan yang melibatkan seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.

Evaluasi : Setelah dilaksanakan sosialisasi pelayanan prima diharapkan semua pegawai dapat merealisasikan.

Rencana Tindak Lanjut : Melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dengan mengutamakan pelayanan prima.

D. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya target 90%.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam organisasi sebab pegawai merupakan aset yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai hasil yang optimal. Pengembangan mewakili suatu inventasi yang berorientasi ke masa depan dalam diri pegawai dan menekankan pada peningkatan kemampuan melaksanakan tugas baru dimasa yang akan datang. KKP Kelas II Dumai setiap tahunnya mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat dalam peningkatan kompetensi baik berupa Diklat fungsional atau diklat teknis serta berbagai pelatihan, bimtek atau workshop lainnya yang dilaksanakan oleh pihak luar satker. Pada tahun 2023 peningkatan kompetensi pegawai dilakukan secara tatap muka (Luring) dan secara daring.

Monitoring kegiatan pengikutsertaan pegawai dalam upaya peningkatan kompetensi dilakukan setiap bulan. Hasil monitoring kegiatan peningkatan kompetensi untuk tahun 2023. Sebagian besar peningkatan kompetensi ASN diikuti secara Non Klasikal sebesar 80 % dan secara tatap muka (Klasikal) hanya 20 %. Hal ini di karenakan, sebagian besar Pegawai banyak yang mengikuti webinar-webinar walaupun sudah mengikuti pelatihan secara Klasikal.

E. Persentase realisasi anggaran target 95%.

1. Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III DUMAI

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	PAGU	0	2,755,508,000	710,650,000	0	0	0	0	0	0	3,466,158,000
		REALISASI	0.00%	2,666,300,194 (96.76%)	707,050,000 (99.49%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,373,350,194 (97.32%)
2	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	SISA	0	89,207,806	3,600,000	0	0	0	0	0	0	92,807,806
		PAGU	6,485,495,000	3,544,318,000	0	0	0	0	0	0	0	10,029,813,000
2	4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	REALISASI	6,471,210,893 (99.78%)	3,411,472,083 (96.25%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,882,682,976 (98.53%)
		SISA	14,284,107	132,845,917	0	0	0	0	0	0	0	147,130,024
GRAND TOTAL		PAGU	6,485,495,000	6,299,826,000	710,650,000	0	0	0	0	0	0	13,495,971,000
		REALISASI	6,471,210,893 (99.78%)	6,077,772,277 (96.48%)	707,050,000 (99.49%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	13,256,033,170 (98.22%)
GRAND TOTAL		SISA	14,284,107	222,053,723	3,600,000	0	0	0	0	0	0	239,937,830

Berdasarkan data diatas terlihat Realisasi belanja per jenis kegiatan 4249 | Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah sebesar 3,373,350,194 (97.32%), dan 4815 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 9,882,682,976 (98.53%). Dengan total realisasi belanja per jenis kegiatan sebesar 13,256,033,170 (98.22%).

2. Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III DUMAI

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	415752 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI	PAGU	6,485,495,000	6,299,826,000	710,650,000	0	0	0	0	0	0	13,495,971,000
		REALISASI	6,471,210,893 (99.78%)	6,077,772,277 (96.48%)	707,050,000 (99.49%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13,256,033,170 (98.22%)
GRAND TOTAL		SISA	14,284,107	222,053,723	3,600,000	0	0	0	0	0	0	239,937,830
		PAGU	6,485,495,000	6,299,826,000	710,650,000	0	0	0	0	0	0	13,495,971,000
GRAND TOTAL		REALISASI	6,471,210,893 (99.78%)	6,077,772,277 (96.48%)	707,050,000 (99.49%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	13,256,033,170 (98.22%)
		SISA	14,284,107	222,053,723	3,600,000	0	0	0	0	0	0	239,937,830

Berdasarkan data diatas terlihat Realisasi belanja per jenis belanja pegawai sebesar 6,471,210,893 (99.78%), belanja barang sebesar 6,077,772,277 (96.48%) dan belanja modal 707,050,000 (99.49%). Dengan total realisasi belanja per jenis belanja sebesar 13,256,033,170 (98.22%).

BAB IV HASIL KERJA

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Substansi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai didasarkan pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai tahun 2021-2025 yang merupakan sasaran prioritas program-program pencegahan dan pengendalian penyakit. Rencana kegiatan ini dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2023. Adapun program kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai pada tahun 2023

PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN SUBSTANSI PK DAN SE Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai TAHUN 2023

Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk Negara dan Wilayah (4249) memiliki 6 Rincian Output dengan 789 Target Volume Rincian Output.

No.	Program	Kegiatan	RO	TVRO	RVRO	%
1	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	PEA 001 Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	5	5	100
2	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH.017 Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	4	4	100
3	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH.U01 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan Penyeberangan	330	330	100
4	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	QAH.U19 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan	429	429	100
5	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	RAB.001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di Pintu masuk	6	6	100

6	DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	TBC.001 Pelatihan kesehatan	15	22	147
---	--	--	------------------------------------	----	----	-----

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian Realisasi Volume Rincian Output tercapai 100% dan terdapat satu Realisasi Volume Rincian Output sebesar 147% yaitu pada Pelatihan Kesehatan dikarenakan pada awalnya ditargetkan sebanyak 15 orang, pada akhir tahun anggaran 2023 tercapai 22 orang. Capaian melebihi target ini didapatkan karena pada triwulan ke IV (Okt s.d Des 2023) terdapat revisi anggaran biaya perjalanan dinas menjadi biaya jasa pelatihan sebesar Rp. 14.000.000 sehingga dapat mengakomodir jumlah peserta yang mengikuti pelatihan secara online.

A. Pencapaian Kegiatan

Pada kurun waktu tahun 2023 telah dilakukan berbagai kegiatan dan upaya dalam mendukung program pencegahan dan pengendalian penyakit, kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dicerminkan dari kinerja tiap kegiatan di dalamnya dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Uraian berikut akan menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran setiap kegiatan dalam lingkup substansi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi KKP Kelas II Dumai.

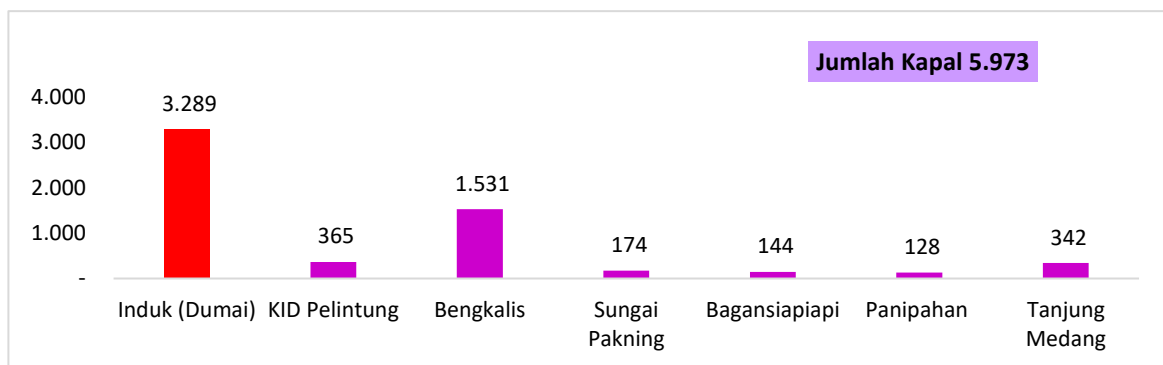
1. Pengawasan dan Pemeriksaan Alat Angkut

a. Pengawasan dan Pemeriksaan Kedatangan Kapal dari Luar Negeri

Berdasarkan Permenkes No 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekekarantinaan dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pada pasal 19 dinyatakan bahwa setiap kapal yang datang dari luar negeri atau mengambil penumpang/barang dari luar negeri berada dalam status karantina. Nakhoda kapal sebagaimana kapal dimaksud hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang atau barang setelah diberikan surat persetujuan kekarantinaan oleh petugas atau pejabat karantina kesehatan.

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kedatangan kapal dalam karantina dilaksanakan oleh tim boarding Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sesuai standar kekarantinaan pada setiap kedatangan. Kapal dinyatakan bebas karantina apabila setelah pemeriksaan memenuhi semua persyaratan dokumen yang telah ditentukan. Sedangkan dari aspek kesehatan tidak ditemuinya adanya masalah kesehatan atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN KAPAL
DARI LUAR NEGERI TAHUN 2023



Dilihat jumlah pengawasan/pemeriksaan kedatangan kapal dalam karantina dari luar negeri yang dilakukan oleh KKP Kelas II Dumai pada tahun 2023 adalah sebanyak 5.973 kapal dengan jumlah terbanyak adalah pada wilayah induk sebanyak 3.289 kapal dan jumlah paling kecil pada wilayah kerja Panipahan sebanyak 128 kapal yang datang dari luar negeri.

Kedatangan kapal dari luar negeri pada wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Dumai pada umumnya datang dari pelabuhan negara Singapura, Malaysia, India, China, beberapa negara asia, eropa dan Afrika lainnya. Jenis kapal yang masuk melalui Pelabuhan pada wilayah induk dan wilayah kerja KKP Kelas II Dumai adalah kapal tanker yang akan melakukan bongkar muat komoditas CPO/minyak goreng, minyak mentah, bahan kimia, bahan baku pelumas, dan lain-lain. Sedangkan kapal kargo yang akan melakukan bongkar muat komoditas pupuk, sisa hasil pengolahan sawit, dan lain-lain. Sementara kapal-kapal rakyat yang akan melakukan bongkar muat komoditas buah-buahan, sembako, dan lain-lain. Adapun kapal penumpang cepat/ speed boat dari Malaysia yang masuk melalui pelabuhan Dumai dan Bengkalis beroperasi seperti biasanya dikarenakan masa pandemic covid-19 sudah beralih menjadi endemi.

Semenjak WHO menetapkan COVID-19 sebagai endemi akan tetapi pemeriksaan terhadap kedatangan kapal dari luar negeri masih tetap diperketat karena bisa saja masa inkubasi terhadap beberapa penyakit *emerging* dan *re-emerging* masih ditemukan. Pemeriksaan semua kapal dari luar negeri wajib berlabuh di zona karantina untuk dilakukan pemeriksaan sebelum melakukan aktifitas di area pelabuhan.

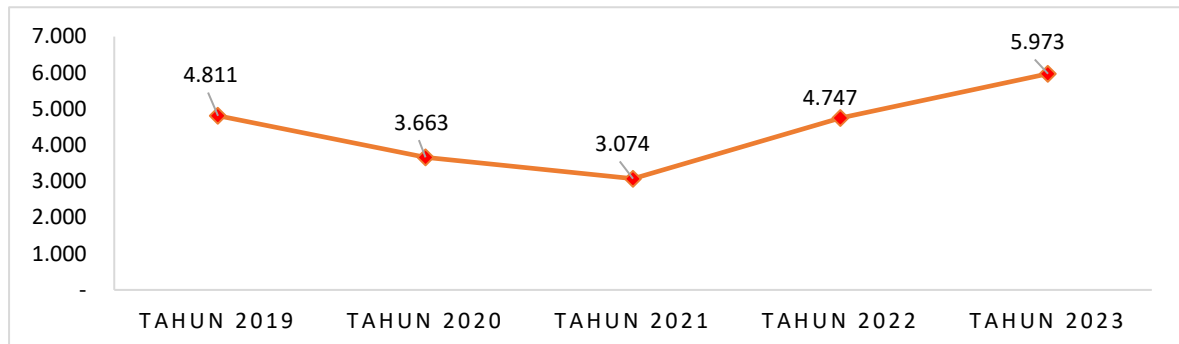
Hasil pengawasan/pemeriksaan kapal dalam karantina dari luar negeri pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Hasil Pengawasan/pemeriksaan terhadap kedatangan kapal dari wilayah terjangkau akan dilakukan tindakan berupa pemberian izin lepas karantina terbatas terhadap kapal jika ada dugaan masalah KKM atau faktor risikonya untuk dilakukan pemeriksaan, penanganan dan tindakan lebih lanjut.

2. Kapal-kapal dengan dokumen tidak lengkap atau tidak valid diwajibkan untuk melengkapi atau memperbaharui dokumen sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Semua kapal yang telah dinyatakan bebas dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau faktor risikonya diberikan *Certificate of Pratique/Free Pratique* untuk selanjutnya dapat melakukan aktifitas di area pelabuhan.

Untuk melihat jumlah kedatangan kapal yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN KAPAL DARI LUAR NEGERI TAHUN 2019 S/D 2023



Berdasarkan di atas dapat dilihat bahwa jumlah kedatangan kapal dalam karantina dari luar negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini merupakan dampak dari ditetapkannya endemi COVID-19 yang menyebabkan mulai tingginya mobilisasi dan operasional kapal yang datang dan berangkat melalui pintu masuk KKP Kelas II Dumai baik wilayah induk maupun wilayah kerja.

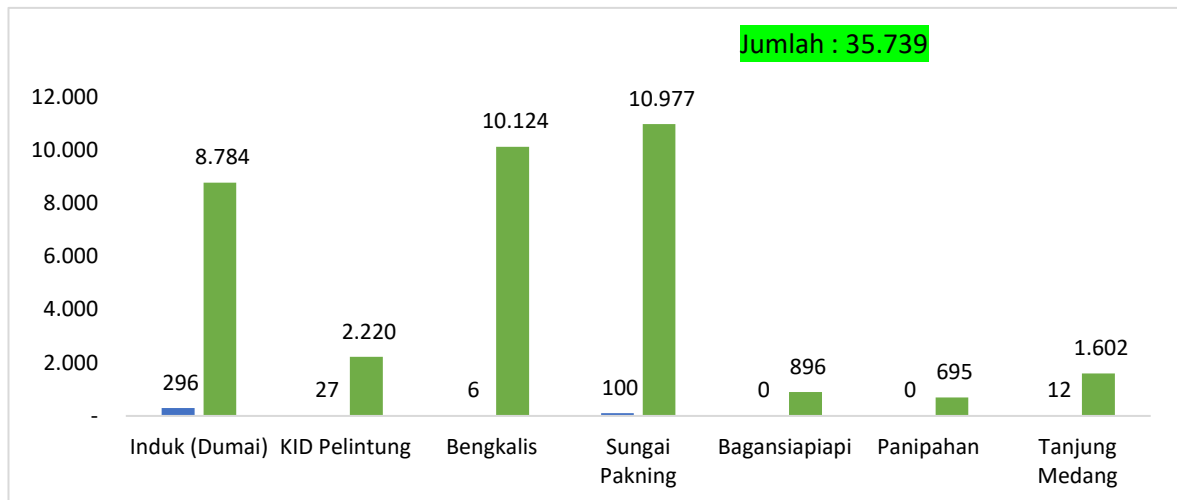
b. Pengawasan Kedatangan Kapal dari Pelabuhan Dalam Negeri

Pengawasan kedatangan kapal dari pelabuhan dalam negeri terdiri dari kedatangan dari pelabuhan wilayah terjangkau dan pelabuhan tidak terjangkau. Kedatangan dari pelabuhan wilayah terjangkau maka kapal tersebut harus mengikuti prosedur kedatangan kapal dalam karantina. Pemeriksaan dilakukan oleh tim boarding KKP Kelas II Dumai sesuai dengan standar pemeriksaan kapal dalam karantina.

Penentuan kedatangan kapal dari wilayah terjangkau pada tahun 2023 berpedoman pada ketetapan oleh Kementerian Kesehatan yang dapat diakses melalui Website <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, Wilayah terjangkau yang dimaksud adalah kedatangan kapal dari suatu wilayah Kabupaten/kota lain masih sebagai wilayah dengan transmisi lokal COVID-19. Sedangkan kedatangan kapal dari pelabuhan wilayah tidak terjangkau dilakukan pemeriksaan jika adanya laporan atau indikasi kejadian penyakit KKM.

Jumlah pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedatangan kapal dari dalam negeri pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

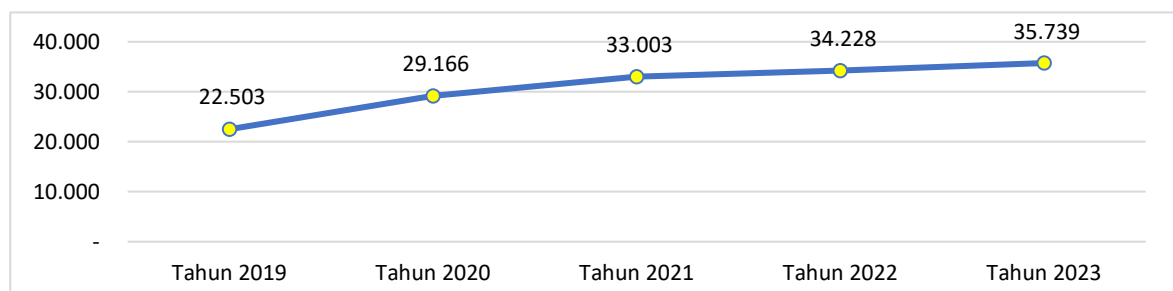
**DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN KAPAL DARI
PELABUHAN DALAM NEGERI TAHUN 2023**



Berdasarkan grafik terlihat bahwa kedatangan kapal dari dalam negeri pada tahun 2023 yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan adalah sebanyak 35.739 yang terdiri dari sebanyak 441 datang dari wilayah terjangkit dan sebanyak 35.298 dari wilayah tidak terjangkit. Kapal dari wilayah terjangkit terbanyak melalui wilayah induk yaitu sebanyak 296 kapal, sedangkan jumlah paling kecil melalui Wilayah Kerja Pelabuhan Panipahan dan Bagan Siapiapi yaitu tidak ada kedatangan kapal. Sedangkan Kapal dari wilayah tidak terjangkit terbanyak melalui wilayah Sungai Pakning yaitu sebanyak 10.977 kapal, sedangkan jumlah paling kecil melalui Wilayah Kerja Pelabuhan Panipahan yaitu sebanyak 695 kapal.

Untuk melihat jumlah kedatangan kapal dari dalam negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

**DISTRIBUSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN KEDATANGAN KAPAL DARI
PELABUHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019 S/D 2023**



Berdasarkan grafik terlihat bahwa pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedatangan kapal dari dalam negeri pada tahun 2023 terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas pada pelabuhan-pelabuhan di wilayah induk serta wilayah kerja lainnya seperti pelabuhan penyeberangan (roro) di Pelabuhan Induk (adanya penambahan tujuan Dumai-Alai Insit), Sungai Pakning dan Bengkalis.

Jenis kapal dalam negeri yang keluar masuk melalui pelabuhan pada wilayah Kerja KKP Dumai yaitu kapal tanker, kapal kargo, kapal penumpang (Ferry/Roro), Tugboat, Tongkang, serta kapal rakyat (Pelra) dan lain-lain.

Hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap kapal yang datang dari dalam negeri yang dilakukan pada tahun 2023 adalah :

1. Hasil Pengawasan/pemeriksaan terhadap kedatangan kapal dari dalam negeri wilayah terjangkit akan dilakukan tindakan berupa pemberian izin lepas karantina terbatas terhadap kapal jika ada dugaan masalah KKMD atau faktor risikonya untuk dilakukan pemeriksaan, penanganan dan tindakan lebih lanjut.
2. Bagi kapal yang datang dari wilayah dalam negeri terjangkit diberikan *Certificate of Pratique (Free Pratique)* apabila hasil pemeriksaan tidak ditemukan masalah KKM atau faktor risikonya untuk selanjutnya diizinkan melakukan aktivitas di pelabuhan.
3. Kapal yang berasal dari pelabuhan dalam negeri tidak terjangkit diizinkan langsung melakukan aktivitas apabila tidak terdapat masalah KKMD atau faktor risikonya.

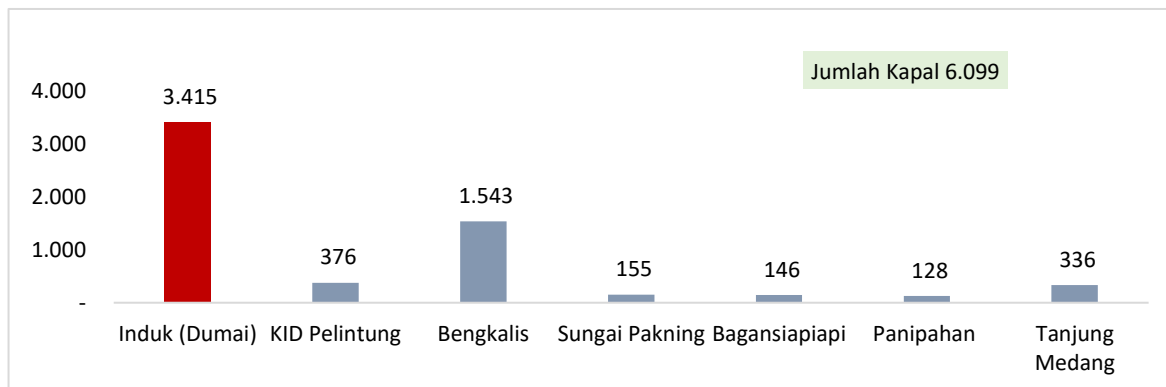
c. Pengawasan/Pemeriksaan Keberangkatan Kapal

Kegiatan pengawasan/pemeriksaan keberangkatan kapal adalah dalam rangka penerbitan dokumen izin berlayar karantina kesehatan atau yang disebut dengan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa pihak Kesyahbandaran tidak dibenarkan menerbitkan surat izin berlayar karantina kesehatan atau yang disebut dengan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pemeriksaan yang dilakukan adalah berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen kesehatan kapal serta pemeriksaan agar kapal yang berangkat dapat dinyatakan bebas masalah KKM atau faktor risikonya. Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan maka pihak kapal harus melengkapi atau memperbaharui terlebih dahulu. Sedangkan jika ditemukan masalah KKM atau faktor risikonya maka terlebih dahulu harus dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Distribusi jumlah keberangkatan kapal yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

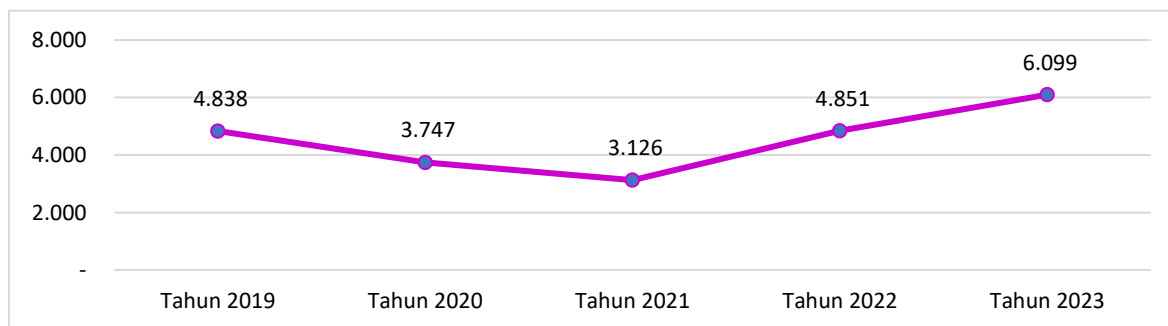
**DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEBERANGKATAN
KAPAL LUAR NEGERI TAHUN 2023**



Berdasarkan grafik terlihat bahwa total keberangkatan kapal luar negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan tahun 2023 adalah sebanyak 6.099 kapal. Jumlah terbanyak keberangkatan kapal luar negeri adalah pada wilayah induk sebanyak 3.415 dan jumlah paling kecil adalah Wilayah Kerja Panipahan sebanyak 128 kapal.

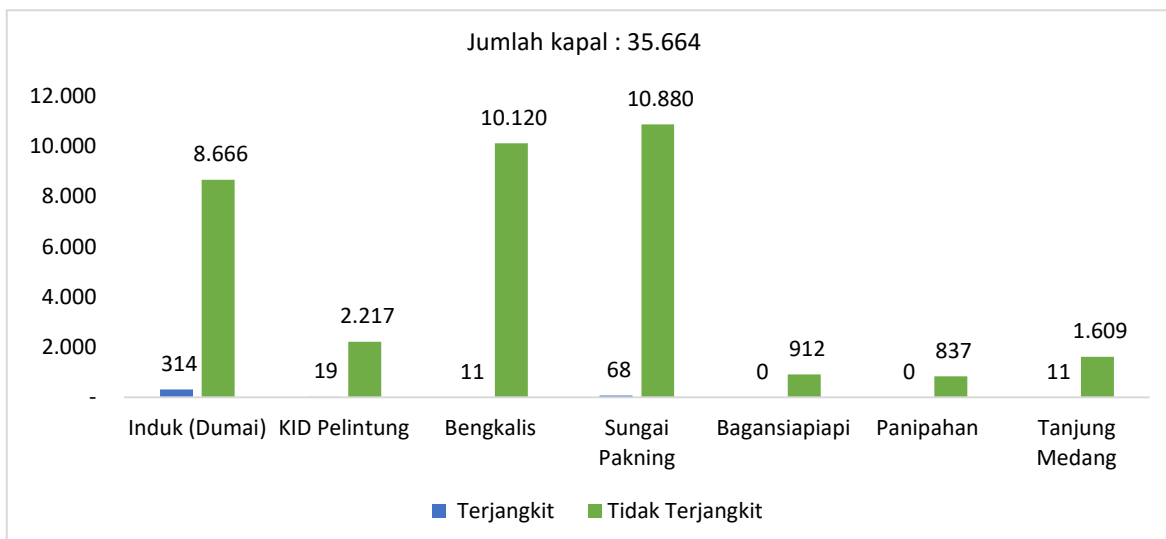
Jumlah pengawasan/pemeriksaan keberangkatan kapal luar negeri yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

**DISTRIBUSI PENGAWASAN KEBERANGKATAN KAPAL LUAR NEGERI
TAHUN 2019 S/D 2023**



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah keberangkatan kapal luar negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada tahun 2023 mulai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 menuju endemi yang menyebabkan tingginya mobilisasi dan operasional keberangkatan kapal melalui pintu masuk di area kerja KKP Kelas II Dumai.

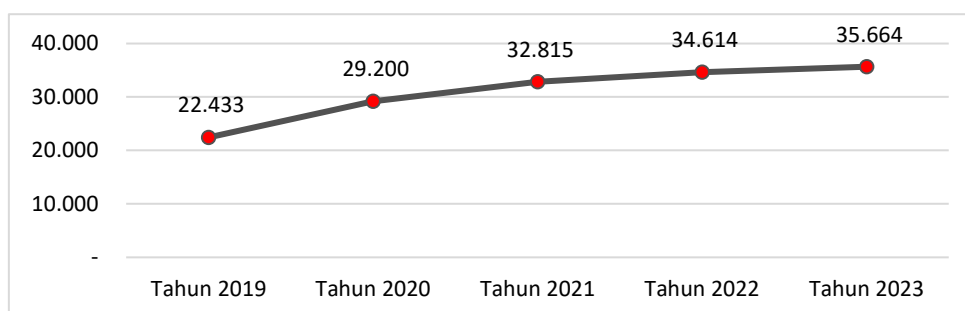
DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEBERANGKATAN KAPAL DALAM NEGERI TAHUN 2023



Berdasarkan grafik terlihat bahwa total keberangkatan kapal yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan adalah sebanyak 35.664 kapal dengan rincian sebanyak 423 kapal wilayah terjangkit sedangkan 35.241 kapal wilayah tidak terjangkit. Kapal dari wilayah terjangkit terbanyak melalui wilayah induk yaitu sebanyak 314 kapal, sedangkan jumlah paling kecil melalui Wilayah Kerja Pelabuhan Panipahan dan Bagan Siapiapi yaitu tidak ada kedatangan kapal. Sedangkan Kapal dari wilayah tidak terjangkit terbanyak melalui wilayah Sungai Pakning yaitu sebanyak 10.880 kapal, sedangkan jumlah paling kecil melalui Wilayah Kerja Pelabuhan Panipahan yaitu sebanyak 837 kapal.

Jumlah pengawasan/pemeriksaan keberangkatan kapal dalam negeri yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

DISTRIBUSI PENGAWASAN KEBERANGKATAN KAPAL DALAM NEGERI TAHUN 2019 S/D 2023



Berdasarkan grafik terlihat bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan pengawasan/pemeriksaan keberangkatan kapal dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya aktivitas beberapa pelabuhan di wilayah induk dan wilayah kerja KKP Kelas II Dumai.

Hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2023 adalah :

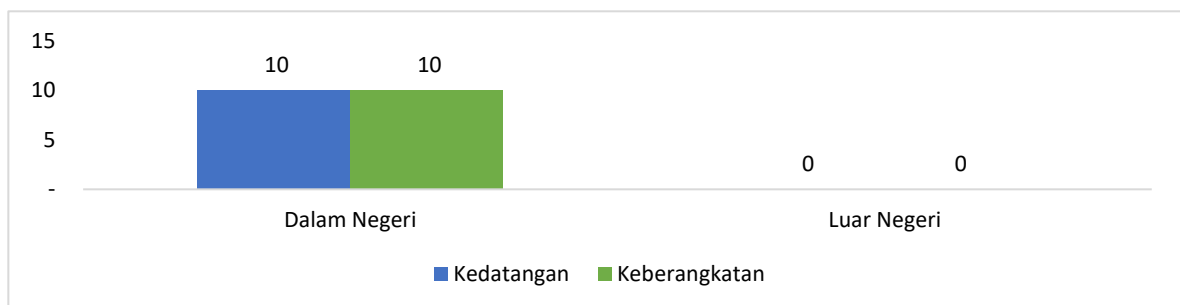
1. Tidak ditemukan kejadian berpotensi KKM atau faktor risikonya pada saat pemeriksaan keberangkatan kapal
2. Semua kapal yang telah memenuhi syarat dokumen dan tidak ditemukan masalah kesehatan atau faktor risikonya diterbitkan Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan.

1. *Pengawasan Lalu Lintas Pesawat*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dinyatakan bahwa petugas kantor kesehatan pelabuhan berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pesawat, awak maupun penumpang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesawat yang datang maupun berangkat bebas dari faktor risiko maupun masalah kesehatan lainnya.

Kegiatan pengawasan/pemeriksaan kedatangan pesawat pada Wilayah Kerja Bandara Pinang Kampai pada tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

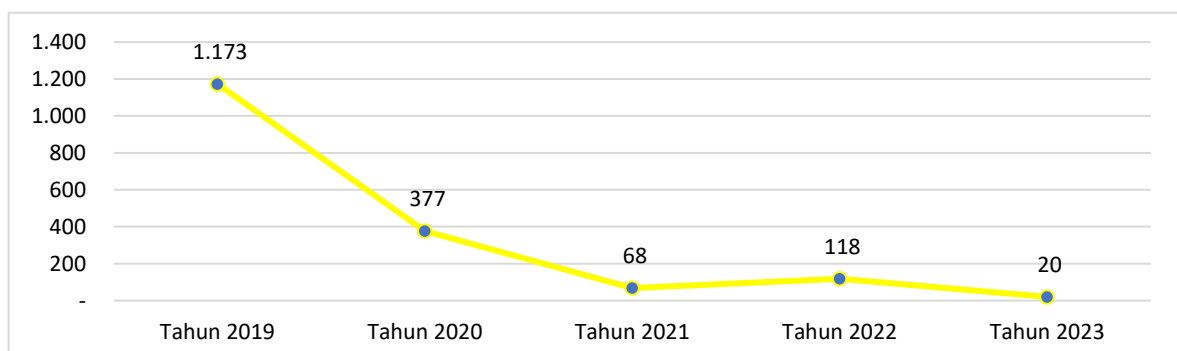
DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PESAWAT DI BANDARA PINANG KAMPAI TAHUN 2023



Dari grafik atas terlihat bahwa jumlah kedatangan maupun keberangkatan pesawat pada tahun 2023 yang dilakukan pengawasan adalah sebanyak 20 pesawat. Pengawasan yang dilakukan hanya untuk kedatangan dan keberangkatan dalam negeri karena Bandara Pinang Kampai Dumai bukan merupakan Bandara Internasional.

Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat yang dilakukan pengawasan selama 5 tahun terakhir adalah :

DISTRIBUSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PESAWAT DI BANDARA PINANG KAMPAI TAHUN 2019 S/D 2023



Dilihat dari grafik di atas terlihat bahwa mulai terjadi penurunan jumlah pesawat yang dilakukan pengawasan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya edaran dari dinas perhubungan kota Dumai yang menyatakan tidak beroperasionalnya Bandara Pinang Kampai pada tahun 2023 sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan.

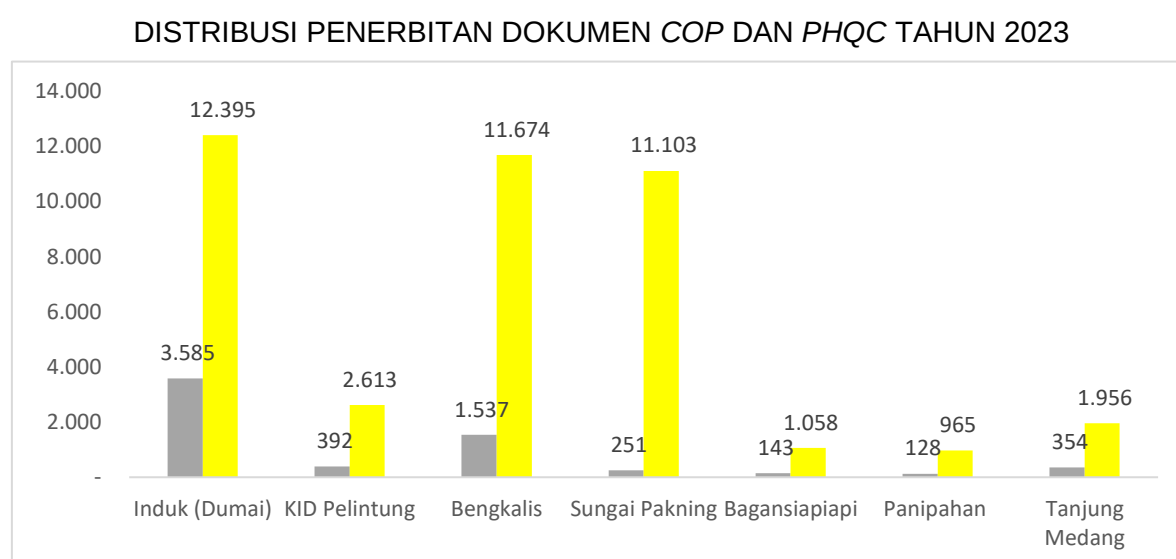
2. Penerbitan Dokumen Kesehatan

a. Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dinyatakan bahwa dokumen kesehatan untuk alat angkut (kapal laut) terdiri dari deklarasi kesehatan, sertifikat persetujuan karantina kesehatan, sertifikat sanitasi, sertifikat obat-obatan dan alat kesehatan, buku kesehatan kapal, dan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan.

Setiap kapal yang datang dan berangkat melalui pelabuhan harus memiliki dokumen kesehatan sebagaimana ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Untuk kapal yang datang dari luar negeri atau pelabuhan dalam negeri terjangkau wajib menyerahkan Deklarasi Kesehatan Maritim atau yang disebut *Maritime Declaration of Health (MDH)* dan setelah dilakukan pengawasan atau pemeriksaan akan diberikan Sertifikat Izin Karantina atau yang disebut *Certificate of Pratique (CoP)* baik Izin Bebas Karantina atau *Free Pratique* maupun Izin Terbatas Karantina atau *Restricted Pratique*. Sedangkan untuk kapal yang berangkat baik ke dalam maupun ke luar negeri harus memperoleh Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atau yang disebut *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* yang diterbitkan oleh Pejabat pada Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Untuk melihat jumlah dokumen *CoP* dan *PHQC* yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

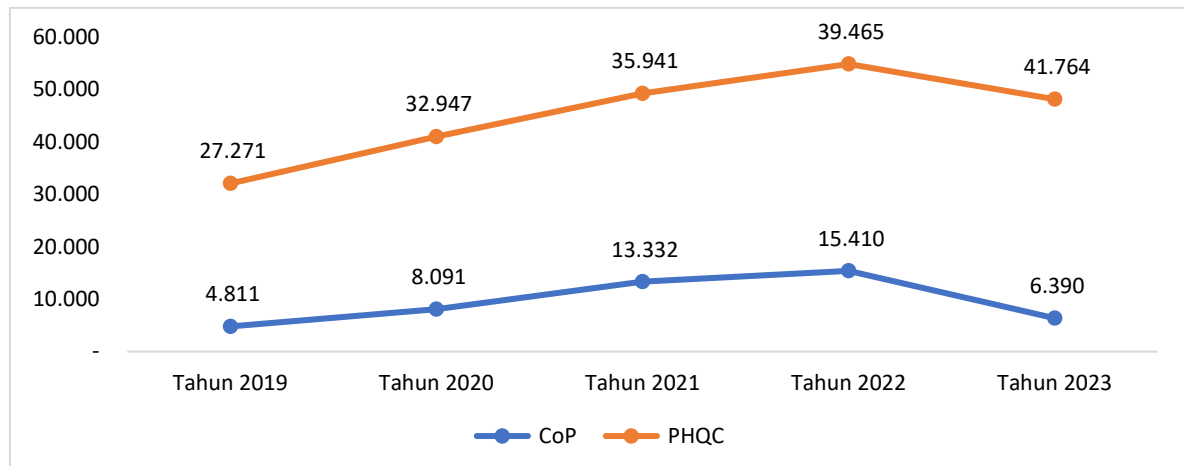


Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jumlah penerbitan dokumen *CoP* pada tahun 2023 adalah sebanyak 6.390 dokumen. Jumlah dokumen *CoP* paling banyak

diterbitkan wilayah induk sebanyak 3.585 dokumen dan jumlah paling kecil di Wilayah Kerja Panipahan sebanyak 128 dokumen. Jumlah penerbitan *PHQC* pada tahun 2022 adalah sejumlah 41.764 dokumen dengan jumlah penerbitan terbanyak di wilayah induk sebanyak 12.395 dokumen dan jumlah terkecil di Wilayah Kerja Panipahan sebanyak 965 dokumen.

Jumlah dokumen *CoP* dan *PHQC* yang diterbitkan pada seluruh wilayah kerja KKP Kelas II Dumai selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

DISTRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN *CoP* DAN *PHQC*
TAHUN 2019 S/D 2023



Berdasarkan grafik di atas terlihat jumlah penerbitan dokumen *CoP* yang diterbitkan mulai mengalami penurunan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena sejak Februari tahun 2023 tidak adanya wilayah dalam negeri terjangkau karena sudah dalam masa endemi menuju bebas covid-19. Sedangkan penerbitan *PHQC* juga meningkat karena meningkatnya aktivitas di beberapa pelabuhan di wilayah kerja KKP Kelas II Dumai.

Kemudian dokumen lain yang harus dimiliki oleh setiap kapal adalah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal atau yang disebut *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)* atau Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal atau yang disebut *Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)*, yang merupakan salah satu syarat untuk penerbitan *CoP* maupun *PHQC*. Sertifikat *SSCEC* atau *SSCC* berlaku selama 6 bulan, hal ini sesuai dengan amanat peraturan kesehatan internasional atau *International Health Regulation (IHR)* 2005. Dokumen *SSCEC* atau *SSCC* harus dilakukan pembaharuan sebelum habis masa berlakunya dan bagi kapal yang belum mempunyai sertifikat ini harus dilakukan penerbitan baru. Penerbitan dokumen *SSCEC/SSCC* akan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan atau tindakan penyehatan terhadap kapal yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat.

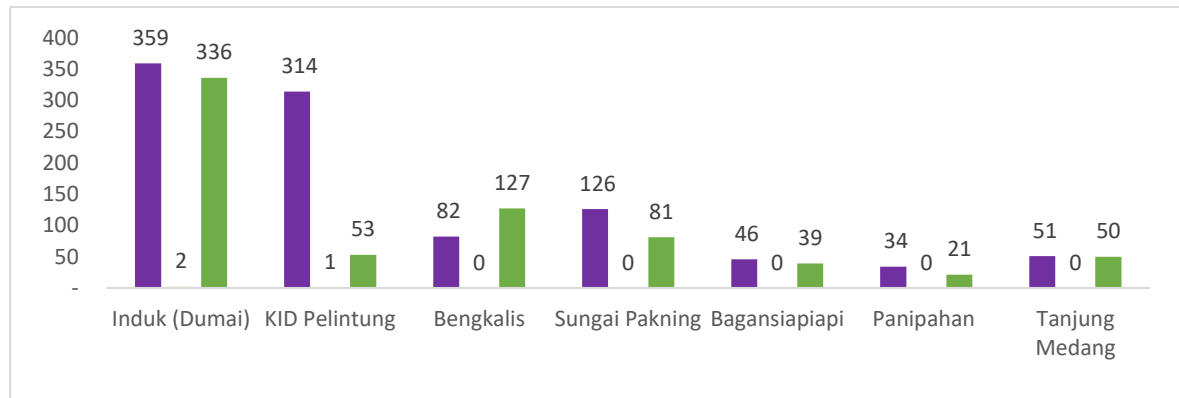
Dokumen Buku kesehatan (*Health Book*) harus dimiliki oleh setiap kapal yang akan berlayar dari pelabuhan Indonesia. Buku kesehatan merupakan alat komunikasi antar pelabuhan dan diisi petugas kantor kesehatan pelabuhan mengenai keadaan kesehatan kapal sewaktu datang, selama di pelabuhan, dan akan berangkat ke pelabuhan tujuan yang ditandatangani oleh pejabat kesehatan pelabuhan kemudian disahkan oleh pejabat dari

Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*).

Untuk melihat jumlah dokumen SSCEC/SSCC dan Buku Kesehatan yang diterbitkan sepanjang tahun 2023 sebagaimana pada grafik berikut :

DISTRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN SSCEC/SSCC DAN BUKU KESEHATAN TAHUN

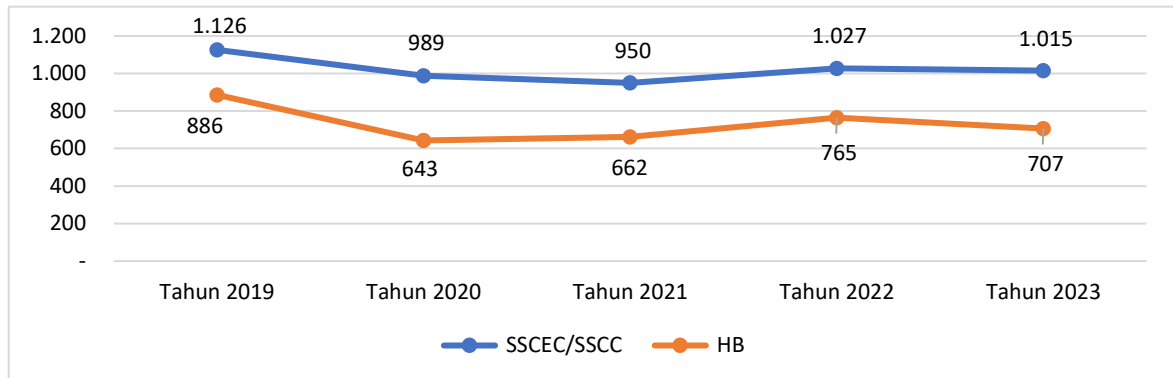
2023



Berdasarkan grafik di atas terlihat penerbitan dokumen SSCEC pada tahun 2023 adalah sebanyak 1.012 sertifikat dengan jumlah terbanyak diterbitkan pada wilayah induk yaitu sebanyak 359 dokumen dan paling kecil diterbitkan di Wilayah Kerja Panipahan sebanyak 34 sertifikat. Sedangkan buku kesehatan yang diterbitkan pada tahun 2023 adalah sebanyak 707 buku kesehatan dengan jumlah terbanyak di wilayah Induk sebanyak 336 buku dan paling sedikit di Wilayah Kerja Panipahan dengan jumlah 21 buku kesehatan. Untuk SSCC yang diterbitkan pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 sertifikat dengan jumlah terbanyak di wilayah Induk sebanyak 2 sertifikat dan wilayah kerja KID Pelintung sebanyak 1 sertifikat, sedangkan wilayah kerja yang lainnya tidak ada penerbitan sertifikat SSCC.

Jumlah dokumen SSCEC/SSCC dan Buku kesehatan yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

DISTRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN SSCEC/SSCC DAN BUKU KESEHATAN TAHUN 2019 S / D 2023



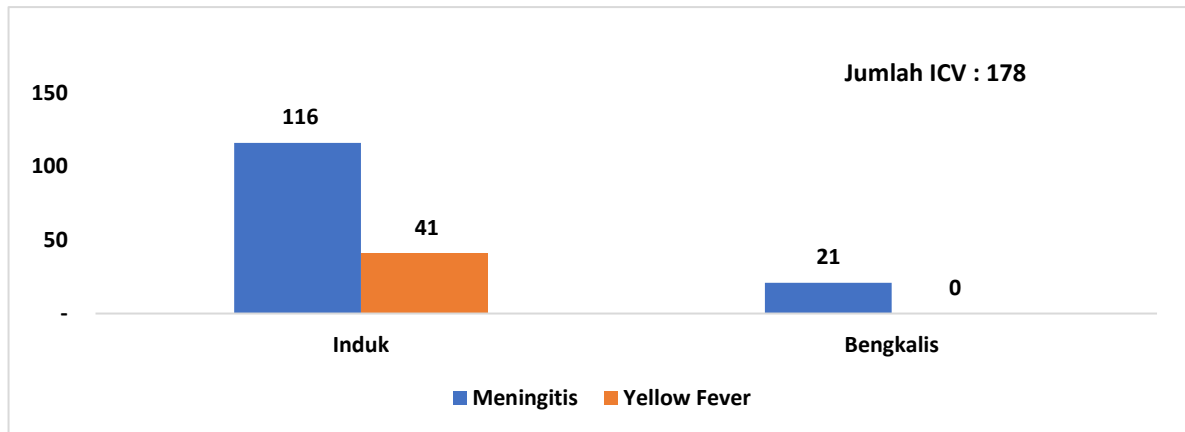
Dari grafik atas dapat dilihat bahwa penerbitan sertifikat SSCEC/SSCC maupun dokumen Buku Kesehatan pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sangat dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah permintaan dari pihak kapal/agen pelayaran yang belum memiliki dokumen, habis masa atau tidak berlaku, maupun perpanjangan masa berlaku dokumen.

b. *Penerbitan Dokumen ICV (International Certificate of Vaccination)*

Vaksinasi internasional merupakan vaksinasi yang dipersyaratkan bagi pelaku perjalanan yang dipersyaratkan oleh suatu negara tertentu untuk dapat keluar masuk ke suatu negara atau wilayah. Vaksinasi tersebut diantaranya adalah Yellow Fever, Meningitis Meningokokal, dan Vaksinasi Polio. Vaksinasi Yellow Fever dipersyaratkan bagi pelaku perjalanan yang akan berkunjung ke daerah endemis yaitu negara-negara di wilayah Benua Afrika dan Amerika Selatan. Sedangkan Vaksinasi Meningitis Meningokokal dipersyaratkan bagi setiap pelaku perjalanan yang akan berkunjung ke negara Saudi Arabia. Sedangkan Vaksinasi Polio dipersyaratkan bagi pelaku perjalanan yang akan masuk dan keluar ke wilayah/negara terjangkit Polio.

Pelayanan vaksinasi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Induk dilaksanakan oleh Substansi UK dan LW, sedangkan untuk pelayanan penerbitan buku ICV dilaksanakan oleh Substansi Pengendalian Karantina dan SE. Jumlah sertifikat ICV yang diterbitkan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

DISTRIBUSI PENERBITAN DOKUMEN ICV TAHUN 2023

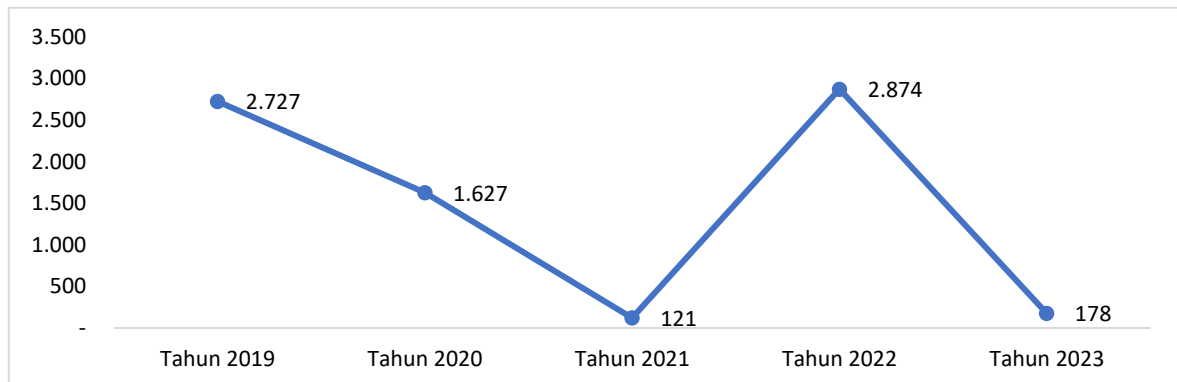


Berdasarkan grafik di atas didapatkan bahwa jumlah ICV yang diterbitkan selama tahun 2023 adalah sebanyak 178 buku ICV dengan rincian sebanyak 137 buku ICV untuk vaksinasi Meningitis Meningokokus, 41 buku ICV untuk vaksinasi Yellow Fever.

Jumlah ICV yang diterbitkan paling tinggi yaitu di wilayah kerja induk sebanyak 157 buku ICV dan yang paling rendah di wilayah kerja bengkalis sebanyak 21 buku ICV, hal ini disebabkan wilayah kerja bengkalis hanya mengakomodir jamaah umroh yang berasal dari kabupaten kota bengkalis saja, sedangkan wilayah induk masih mengakomodir jamaah umroh yang berasal dari kota dumai, kabupaten rohil serta kabupaten bengkalis khususnya daerah kecamatan Mandau, kota duri dan pulau rupert.

Untuk melihat jumlah penerbitan ICV yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

DISTRIBUSI PENERBITAN *INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION*
(ICV)TAHUN 2019 S/D 2023



Berdasarkan grafik terlihat bahwa pada tahun 2023 mulai terjadi penurunan jumlah penerbitan ICV jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tidak diwajibkannya jamaah umroh ke Arab Saudi untuk melakukan vaksinasi terlebih dahulu sebelum keberangkatan ibadah umroh.

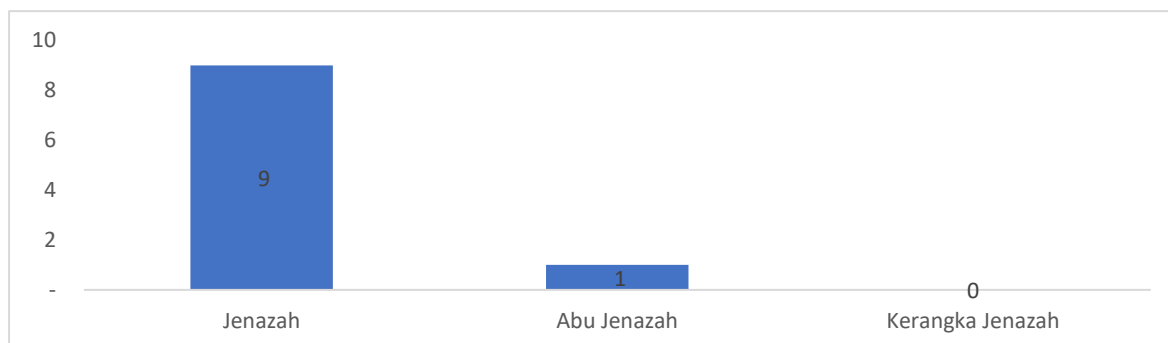
3. *Pengawasan Lalu Lintas jenazah (Jenazah/Abu Jenazah/Kerangka)*

Jenazah/abu jenazah/kerangka yang datang atau berangkat melalui pintu masuk negara harus mengajukan izin angkut jenazah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk kewaspadaan dini sebagai upaya mencegah adanya penularan penyakit yang bisa ditularkan melalui jenazah.

Untuk mendapatkan surat izin angkut jenazah maka pihak keluarga/perwakilan harus melengkapi dokumen surat-surat yaitu surat keterangan dari RS/Dinas Kesehatan, surat keterangan pengawetan jenazah, surat keterangan dari krematorium (untuk abu mayat), surat keterangan pengepakan mayat/pemetian yang memenuhi syarat untuk alat angkut, dan surat keterangan dari kepolisian. Setelah semua dokumen dilengkapi dan penanganan jenazah telah sesuai dengan ketentuan maka jenazah diperbolehkan untuk diangkut dengan menerbitkan surat izin angkut jenazah oleh kantor kesehatan pelabuhan.

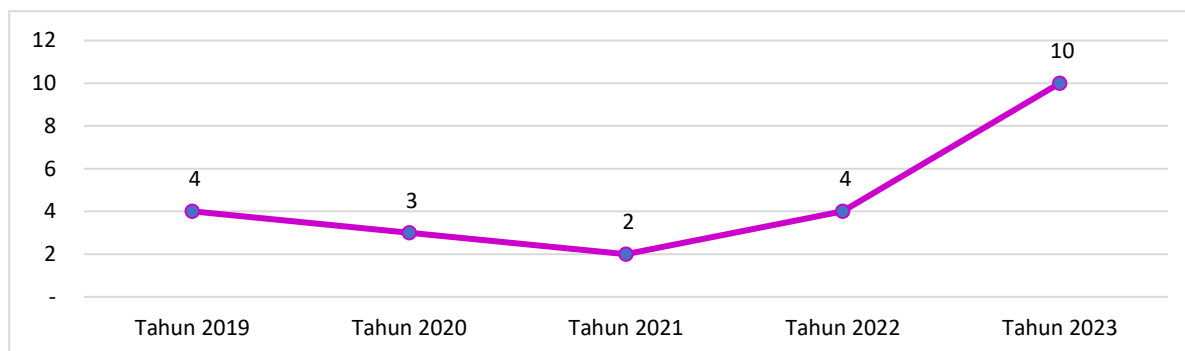
Pada tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah melakukan pengawasan dan penerbitan surat angkut jenazah sebagai berikut :

DISTRIBUSI PENGAWASAN LALU LINTAS JENAZAH TAHUN 2023



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 dilakukan kegiatan pengawasan lalu lintas jenazah sebanyak 10 kegiatan dengan penerbitan dokumen izin angkut jenazah. Hasil pemeriksaan dari 9 jenazah dan 1 Abu jenazah menunjukkan bahwa penyebab kematian bukan disebabkan oleh Bukan Penyakit Menular. Surat izin angkut jenazah diterbitkan setelah semua persyaratan dokumen dan persyaratan pemetian telah memenuhi sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dan diawasi oleh petugas KKP Kelas II Dumai.

DISTRIBUSI PENGAWASAN LALU LINTAS JENAZAH
TAHUN 2019 S / D 2023



Dilihat dari grafik di atas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir kegiatan pengawasan lalu lintas jenazah berkisar antara 1 sampai dengan 10 kegiatan per tahun.

4. Pengawasan Lalu Lintas Obat Makanan Kosmetika Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif (OMKABA)

Obat Makanan Kosmetika Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif (OMKABA) yang masuk atau keluar melalui pintu masuk negara harus mengajukan izin permohonan *health certificate* OMKABA. Hal ini diperlukan sebagai bentuk kewaspadaan dini sebagai upaya mencegah adanya penularan penyakit yang bisa ditularkan melalui OMKABA.

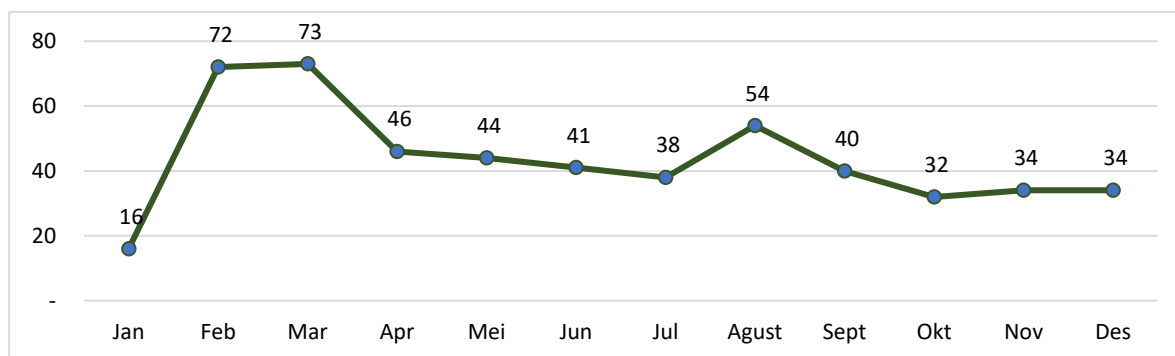
Untuk mendapatkan surat izin *health certificate* OMKABA maka pihak . Agent/eksportir/pemohon harus melengkapi dokumen surat-surat yaitu:

1. COA (certificate of analysis) yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi (SNI).
2. *Invoice* (surat keterangan barang yang berisi jenis barang, jumlah barang dan harga barang).
3. PEB (pemberitahuan ekspor barang) yaitu surat keterangan barang yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea & Cukai yang berisi nama barang, nama kapal, pelabuhan tujuan, jumlah barang, harga barang dan pajak ekspor.
4. *Ocean Bill of Loading*.
5. Surat pernyataan penggunaan barang.
6. Surat kuasa dari eksportir kepada agent yang ditunjuk untuk mengurus perijinan ekspor barang (dikuasakan pihak ke tiga) yang dibubuhi materai secukupnya.
7. Nomor registrasi dari Departemen Kesehatan atau Badan POM jika produk tersebut telah dipasarkan di dalam negeri dan telah diolah.

Setelah semua dokumen dilengkapi dan penanganan OMKABA telah sesuai dengan ketentuan maka OMKABA diperbolehkan untuk diangkut dengan menerbitkan surat izin *health certificate* OMKABA oleh kantor kesehatan pelabuhan.

Pada tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah melakukan pengawasan dan penerbitan surat izin *health certificate* OMKABA sebagai berikut :

DISTRIBUSI PENGAWASAN DAN PENERBITAN SURAT IZIN *HEALTH CERTIFICATE* OMKABA TAHUN 2023



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 dilakukan kegiatan pengawasan dan penerbitan surat izin *health certificate* OMKABA sebanyak 521 *health certificate* sedangkan 3 dokumen diterbitkan dari hasil pemeriksaan sampel makanan ke BBPOM Pekanbaru. Surat izin *health certificate* OMKABA diterbitkan setelah semua persyaratan dokumen dan persyaratan telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dan diawasi oleh petugas KKP Kelas II Dumai.

Kegiatan pengawasan OMKABA pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2023 terdapat laporan disebabkan :

- a. Adanya anggaran biaya pengambilan dan pemeriksaan sampel yang pada tahun 2023 untuk pemeriksaan sampel makanan yang dikirim antar wilayah di Wilayah Kerja KKP Kelas II Dumai sebanyak 3 sampel .
- b. Adanya penerbitan *Health Certificate (HC)* pada tahun 2023 karena adanya permintaan dari Agent/eksportir/pemohon sebanyak 521 sertifikat dimana dokumen *Health Certificate (HC)* yang diberikan berupa surat keterangan atau dokumen yang berasal dari aplikasi SINKARKES.
- c. Wilayah kerja yang memberikan *Health Certificate (HC)* yaitu wilayah kerja Induk.

2. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi

Surveilans atau pengamatan penyakit adalah pengamatan terus menerus dan sistematis terhadap kesakitan dan kematian, penyebaran penyakit serta kejadian atau kondisi yang memperbesar risiko penyebaran penyakit untuk dapat mengambil suatu tindakan. Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan supaya tersedianya data dan informasi epidemiologi secara berkesinambungan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan pencegahan penularan penyakit menular, potensial KLB, dan masalah kesehatan yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) di pintu masuk negara.

Sasaran dari pelaksanaan surveilans epidemiologi adalah awak alat angkut, penumpang, pekerja di lingkungan pelabuhan, serta masyarakat yang ada di sekitar pelabuhan, sebagaimana uraian berikut :

a. Pengawasan Lalu Lintas Penumpang Kapal/Pesawat, Anak Buah Kapal (ABK) dan Kru Pesawat

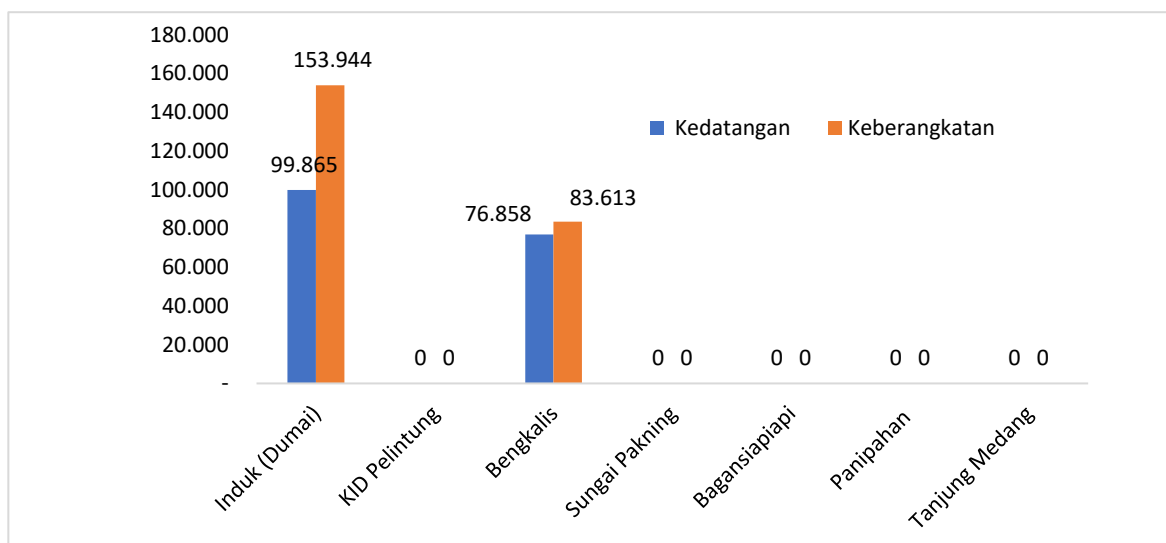
✓ Pengawasan/Pemeriksaan Penumpang Kapal

Penumpang kapal meliputi orang yang diantar dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan merupakan faktor risiko yang paling rentan untuk terjadinya suatu penularan penyakit menular potensial wabah antar wilayah maupun antar negara, maka sangat perlu dilakukan pengawasan/pemeriksaan.

Pengawasan/pemeriksaan dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan kesehatan, wawancara, dan lain-lain.

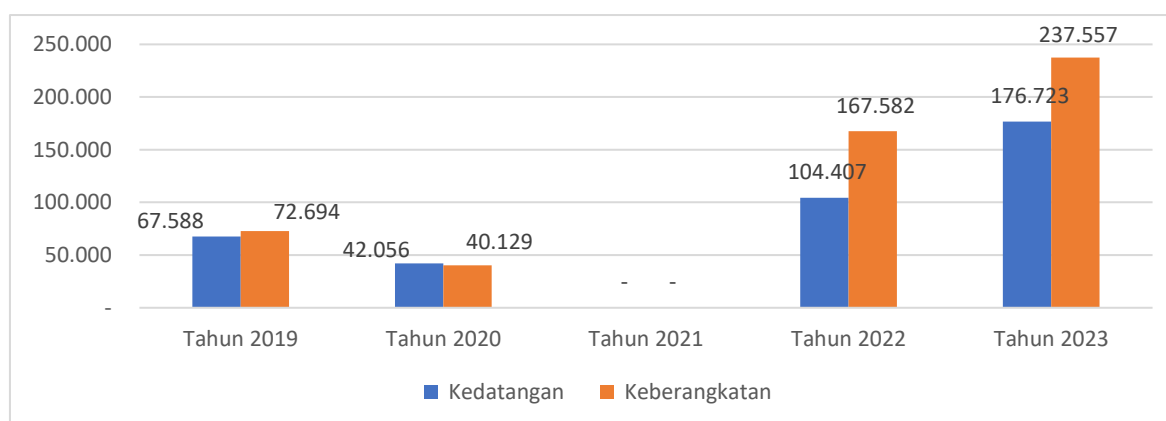
Jumlah penumpang kapal dari/ke luar negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada tahun 2023 adalah pada grafik berikut :

**DISTRIBUSI PENGAWASAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN
PENUMPANG KAPAL DARI / KE LUAR NEGERI TAHUN 2023**



Dari grafik di atas terlihat bahwa kedatangan dan keberangkatan penumpang luar negeri tetap dilakukan pengawasan/pemeriksaan oleh KKP Kelas II Dumai walaupun status covid-19 dinyatakan telah berakhir. Jumlah penumpang kapal yang datang dan berangkat dari/ke luar negeri yang dilakukan pengawasan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

**DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN PENUMPANG KAPAL DARI/KE LUAR
NEGERI TAHUN 2019 S/D 2023**



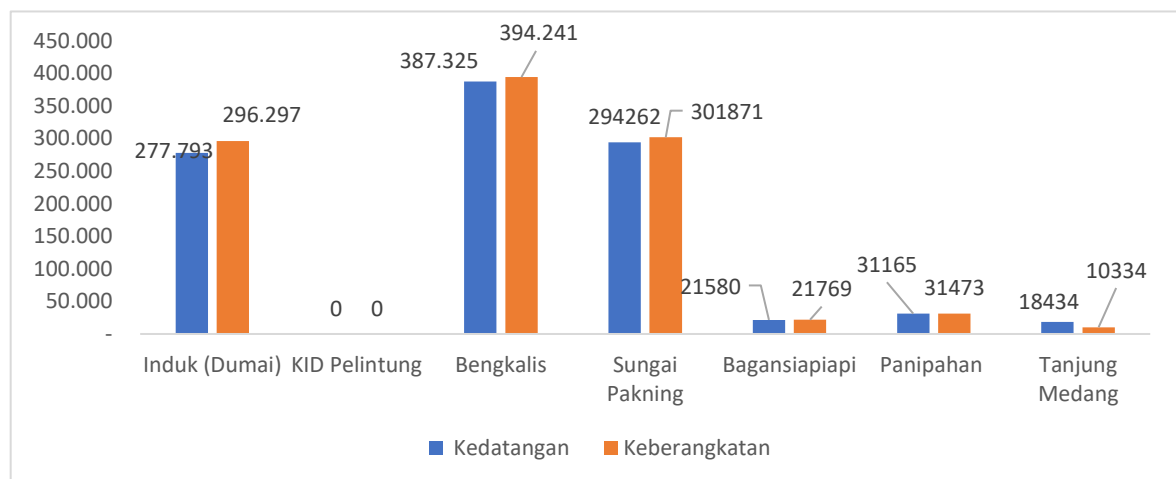
Dilihat dari grafik di atas jumlah penumpang yang datang maupun yang berangkat dari/ke pelabuhan luar negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan. Hal ini disebabkan dampak dari berakhirnya pandemi COVID-

19 sehingga terjadi penambahan jumlah penumpang internasional dari/ke luar negeri baik Pelabuhan Dumai maupun Pelabuhan Bengkalis.

Hasil Pengawasan/pemeriksaan terhadap penumpang kapal dari/ke luar negeri sepanjang tahun 2023 yang telah dilakukan tidak ada ditemukan penumpang yang memiliki indikasi terinfeksi atau terdeteksi penyakit menular.

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan penumpang kapal dari/ke dalam negeri pada tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

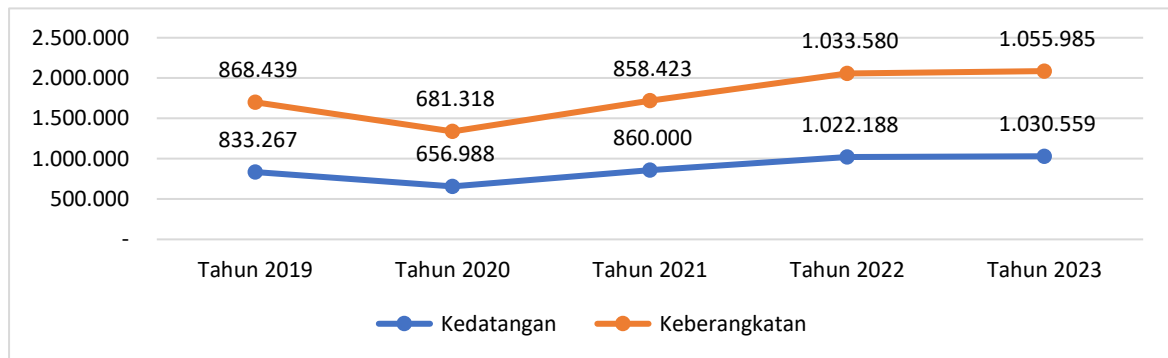
**DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN PENUMPANG KAPAL
DARI/KE DALAM NEGERI TAHUN 2023**



Dari Grafik terlihat bahwa jumlah kedatangan penumpang kapal datang yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan adalah sebanyak 1.030.559 orang, dengan jumlah terbanyak masuk melalui pelabuhan di Wilayah Kerja Bengkalis sebanyak 387.325 orang dan paling sedikit di Wilayah Kerja Tanjung Medang yaitu sebanyak 18.434 orang. Sedangkan keberangkatan penumpang ke dalam negeri adalah sebanyak 1.055.985 orang dengan jumlah terbanyak juga melalui pelabuhan Bengkalis sebanyak 394.421 orang dan jumlah terkecil melalui Wilayah Kerja Tanjung Medang sebanyak 10.334 orang.

Untuk melihat jumlah penumpang kapal yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan baik datang maupun berangkat dari/ke luar negeri selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

**DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN PENUMPANG KAPAL DARI/KE
PELABUHAN DALAM NEGERI TAHUN 2019 S/D 2023**



Berdasarkan grafik terlihat bahwa jumlah penumpang kapal yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan, baik yang datang maupun berangkat dari/ke dalam negeri tahun 2023 sudah mulai mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan bertambahnya aktivitas dan penumpang kapal cepat yang datang dan berangkat melalui Pelabuhan Dumai dan Bengkalis sebagai dampak berakhirnya covid-19.

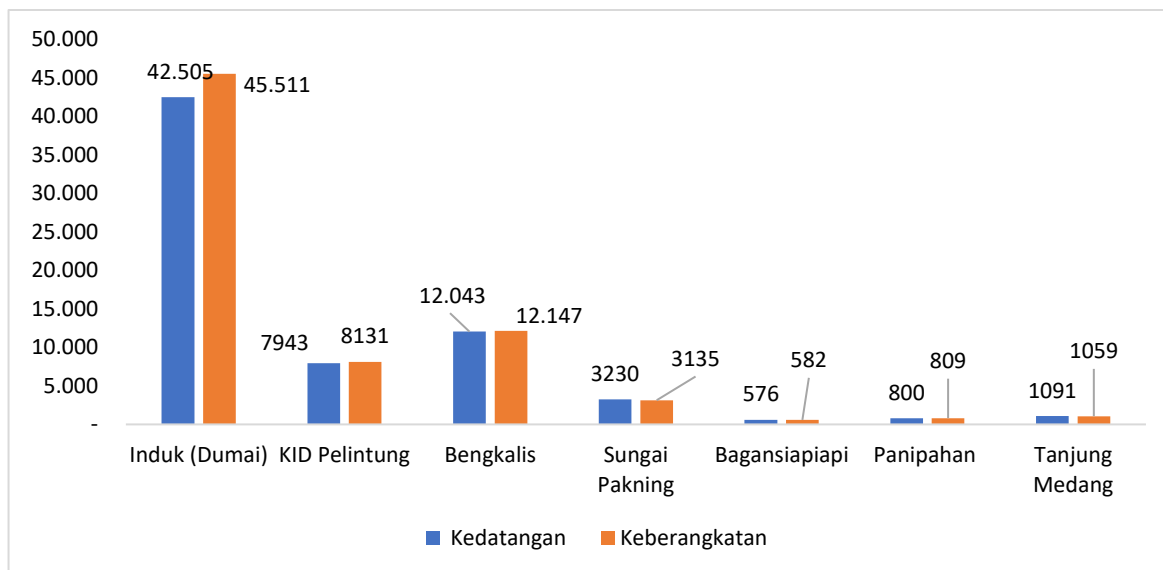
Hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2023 tidak ditemukan adanya penumpang dengan indikasi penyakit yang berpotensi dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat baik yang datang maupun yang akan berangkat.

a. Pengawasan Anak Buah Kapal (ABK)

Anak Buah Kapal (ABK) merupakan faktor risiko yang paling rentan untuk terjadinya suatu penularan penyakit menular potensial wabah antar wilayah maupun antar negara, maka sangat perlu dilakukan pengawasan/pemeriksaan. Pengawasan dan pemeriksaan Anak Buah Kapal dilakukan secara langsung pada saat pemeriksaan kapal baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri.

Untuk melihat pengawasan Anak Buah Kapal (ABK) yang datang dan berangkat dari/ke pelabuhan luar negeri pada tahun 2023 adalah pada grafik berikut :

**DISTRIBUSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)
DARI/KE LUAR NEGERI TAHUN 2023**

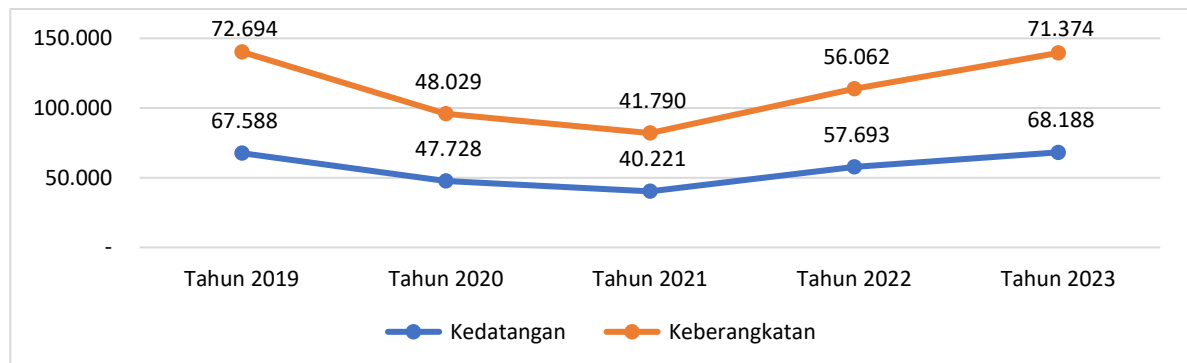


Berdasarkan Grafik didapatkan bahwa total kedatangan ABK yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan adalah sebanyak 68.188 orang dengan jumlah terbanyak pada wilayah induk yaitu sebanyak 42.505 orang dan jumlah paling kecil pada Wilayah Kerja Bagan Siapiapi yaitu sebanyak 576 orang. Sedangkan jumlah keberangkatan ABK ke luar negeri sebanyak 71.374 orang dengan jumlah terbesar juga di wilayah induk sebanyak 45.511 orang dan jumlah terkecil di Wilayah Kerja Bagan Siapiapi sebanyak 582 orang.

Hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap kedatangan dan keberangkatan ABK dari/ke luar negeri selama tahun 2023 adalah tidak ditemukan adanya ditemukan ABK Kapal dengan indikasi penyakit yang berpotensi dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Jumlah ABK datang/berangkat dari/ke pelabuhan luar negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

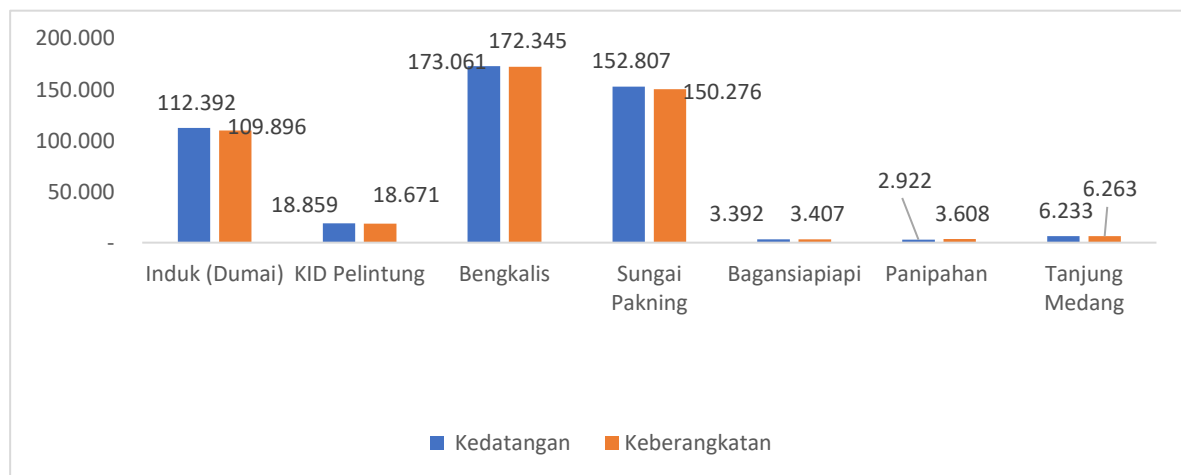
DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) DARI / KELUAR NEGERI TAHUN 2019 S/D 2023



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jumlah ABK kapal yang datang dan berangkat dari/ke pelabuhan luar negeri pada tahun 2023 mulai mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan kembali beraktivitasnya kapal cepat dari Pelabuhan Dumai/Bengkalis ke Malaysia setelah covid-19 dinyatakan telah berakhir.

Sedangkan pengawasan/pemeriksaan terhadap Anak Buah Kapal dari/ke pelabuhan dalam negeri pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) DARI / KE DALAM NEGERI TAHUN 2023



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jumlah ABK dalam negeri yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan pada tahun 2023 adalah sebanyak 469.666 orang kedatangan dan sebanyak 464.466 orang keberangkatan. Jumlah keberangkatan dan kedatangan terbanyak pada Wilayah kerja Bengkalis yaitu 173.061 kedatangan dan 172.345 keberangkatan. Sedangkan jumlah paling kecil adalah di wilayah kerja Panipahan yaitu 2.922 orang datang dan Wilker Bagan siapiapi yaitu 3.407 orang berangkat.

b. Pengawasan Lalu Lintas Penumpang Pesawat

Kegiatan pengawasan/pemeriksaan lalu lintas penumpang pesawat pada Bandara Pinang Kampai Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

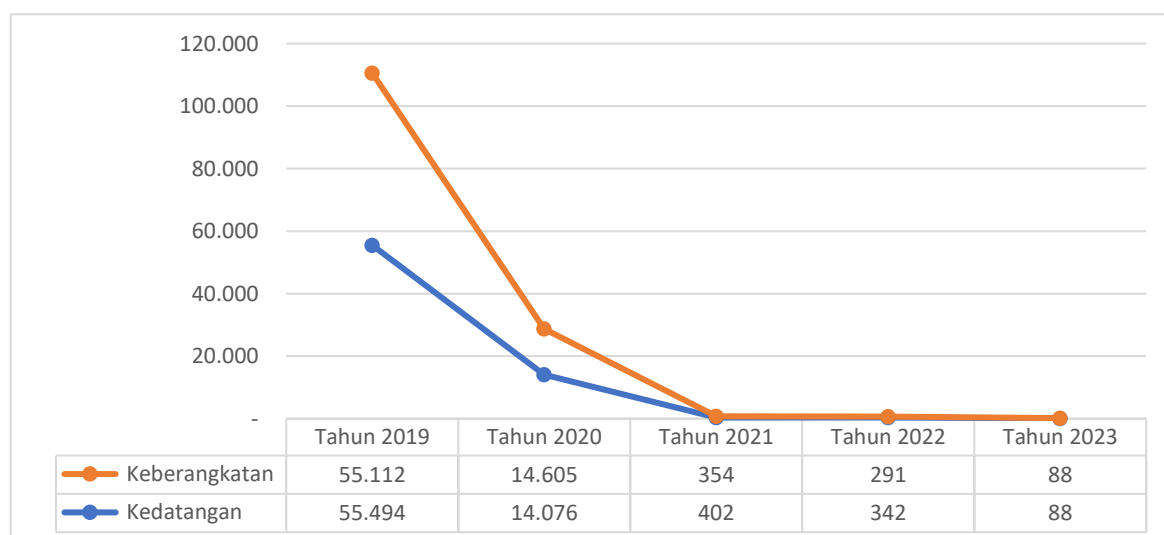
DISTRIBUSI PENGAWASAN/PEMERIKSAAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PENUMPANG PESAWAT TAHUN 2023



Berdasarkan grafik terlihat bahwa jumlah penumpang pesawat datang yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan adalah sebanyak 88 orang dan penumpang pesawat yang berangkat adalah sebanyak 88 orang. Hasil pengawasan yang dilakukan pengawasan tidak ditemukan adanya penumpang pesawat yang terindikasi penyakit KKM.

Jumlah penumpang pesawat yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PENUMPANG PESAWAT TAHUN 2019 S/D 2023

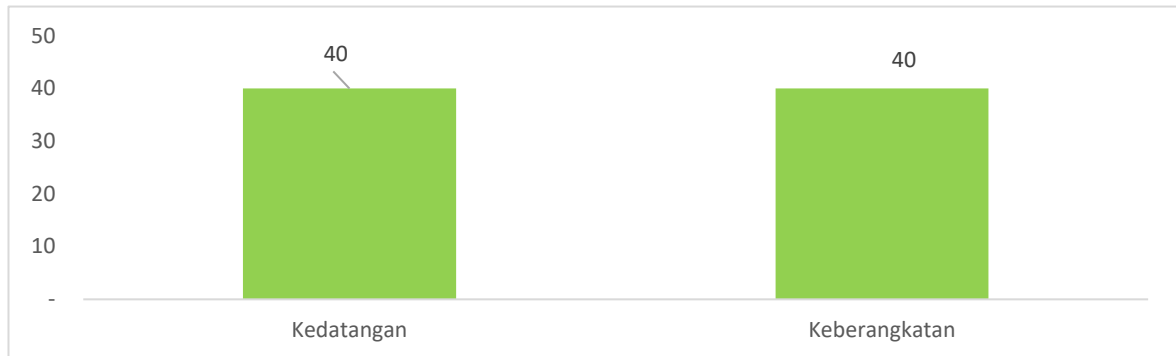


Dari grafik terlihat bahwa pada tahun 2023 pengawasan/pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan terhadap penumpang pesawat terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya surat pemberitahuan dari dinas perhubungan kota dumai yang menyatakan bahwa bandara pinang kampai tidak beroperasi sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan.

c. *Pengawasan/Pemeriksaan Kru Pesawat*

Untuk melihat jumlah kru pesawat yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan di Bandara Pinang Kampai pada tahun 2023 adalah pada grafik berikut :

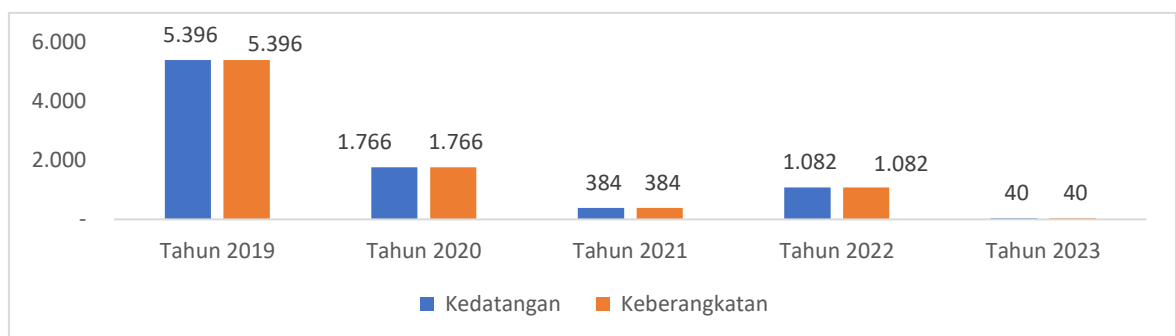
DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN
KRU PESAWAT TAHUN 2023



Berdasarkan grafik jumlah kru pesawat yang dilakukan pengawasan/ pemeriksaan pada tahun 2022 adalah sebanyak 80 orang baik datang maupun berangkat. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya kru pesawat terindikasi penyakit KKMD.

Jumlah kru pesawat yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

DISTRIBUSI PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN
KRU PESAWAT TAHUN 2019 S/D 2023



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa kru pesawat yang dilakukan pengawasan/pemeriksaan terjadi penurunan yang sangat signifikan sekali pada tahun 2023.

Hal ini disebabkan karena adanya surat pemberitahuan dari dinas perhubungan kota dumai yang menyatakan bahwa bandara pinang kampai tidak beroperasi sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan.

b. *Surveilans Epidemiologi pada Sarana Pelayanan Kesehatan Poliklinik Non KKP*

Surveilans Penyakit Menular

Surveilans atau pengumpulan data penyakit menular pada sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerja KKP Kelas II Dumai bertujuan agar tersedianya data sebagai upaya kewaspadaan dini terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah pelabuhan/bandara.

Untuk melihat data penyakit menular yang diperoleh pada seluruh wilayah kerja KKP Kelas II Dumai selama satu tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

**DISTRIBUSI FREKWENSI SURVEILANS PENYAKIT MENULAR PADA SARANA
LAYANAN KESEHATAN NON POLIKLINIK KKP TAHUN 2023**

No	Wilayah Kerja	Jenis Penyakit					
		1. Peny. Karantina /KKMD	2. Malaria	3. Demam Berdarah	4. TBC	5. Diare	6. ISPA
1	Induk (Dumai)	0	0	0	0	0	0
2	KID Pelintung	0	0	0	4	43	726
3	Bengkalis	0	0	1	13	214	1658
4	Sungai Pakning	0	0	0	0	81	2378
5	Bagansiapiapi	0	56	40	42	451	1644
6	Panipahan	0	980	0	51	100	294
7	Tanjung Medang	0	0	0	8	133	2160
8	Bandara Pinang Kampai	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	1036	41	118	1022	8860

No	Wilayah Kerja	Jenis Penyakit					
		7. HIV/AIDS	8. Campak	9. Polio	10. Difteri	11. Pertusis	12. Tetanus
1	Induk (Dumai)	0	0	0	0	0	0
2	KID Pelintung	0	0	0	0	0	0
3	Bengkalis	0	2	0	0	0	0
4	Sungai Pakning	0	0	0	0	0	0
5	Bagansiapiapi	0	0	0	0	0	0
6	Panipahan	0	2	0	0	0	0
7	Tanjung Medang	0	0	0	0	0	0
8	Bdr. Pinang Kampai	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	4	0	0	0

No	Wilayah Kerja	Jenis Penyakit	Jumlah
----	---------------	----------------	--------

		13. Hepatitis	14. Lain- lain	(1 s/d 14)
1	Induk (Dumai)	0	0	0
2	KID Pelintung	77	0	850
3	Bengkalis	5	26	1919
4	Sungai Pakning	0	0	2459
5	Bagansiapiapi	0	0	2233
6	Panipahan	0	0	1427
7	Tanjung Medang	0	0	2301
8	Bdr. Pinang Kampai	0	0	0
Jumlah		82	26	11189

Berdasarkan tabel didapatkan hasil pengumpulan data penyakit menular selama tahun 2023 tidak adanya ditemukan adanya kasus kejadian penyakit karantina/ KKMD. Penyakit terbanyak pada setiap wilayah kerja pada umumnya adalah ISPA sebanyak 8.860 kemudian Malaria sebanyak 1.036 selanjutnya Diare sebanyak 1.022 kasus.

a. Surveilans Penyakit Tidak Menular

Sementara untuk distribusi penyakit tidak menular yang dapat di pantau dari sarana pelayanan kesehatan non poliklinik KKP Kelas II Dumai pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL DISTRIBUSI FREKWENSI SURVEILANS PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA
SARANA LAYANAN KESEHATAN NON POLIKLINIK KKP TAHUN 2023

No	Wilayah Kerja	Jenis Penyakit				Jumlah
		Jantung	Hipertensi	Akibat Kec. Kerja	Lain- lain	
1	Induk (Dumai)	36	230	0	173	439
2	KID Pelintung	37	227	0	0	264
3	Bengkalis	0	0	0	0	0
4	Sungai Pakning	0	622	0	2441	3063
5	Bagansiapiapi	36	5909	5	2504	8454
6	Panipahan	10	3273	71	180	3534
7	Tanjung Medang	0	969	0	1120	2089

8	Bdr. Pinang Kampai	0	134	0	86	220
Jumlah		119	11364	76	6504	18063

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa kejadian penyakit tidak menular terbanyak secara berturut dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu lain -lain sebanyak 6.504, Hipertensi sebanyak 11.364 kasus, penyakit jantung sebanyak 119 kasus dan penyakit Akibat Kecelakaan Kerja sebanyak 76 kasus.

3. Pelaksanaan Jejaring Kerja dan Kemitraan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik lintas program maupun lintas sektoral. Berkenaan dengan hal tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai selalu melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi dengan instansi terkait antara lain :

1. Kegiatan pengendalian kekarantinaan/pengawasan alat angkut (kapal dan pesawat) dilakukan koodinasi dan jejaring kerja dengan kantor KSOP, Imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, TNI/POLRI, BASARNAS, Pengelola Pelabuhan/Bandara, Pemilik Kapal, Organisasi Perusahaan Pelayaran (INSA/ISAA), Perusahaan Keagenan Pelayaran, otoritas Bandara dan Maskapai Penerbangan.
2. Jejaring kerja dan kemitraan pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi serta pengendalian penyakit dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan unit layanan Kesehatan lainnya di wilayah kerja pelabuhan/bandara.

Pada Substansi PKSE diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pengawasan dan pemeriksaan kedatangan kapal sebanyak 41.689 kapal, dan pengawasan keberangkatan kapal sebanyak 41.762 kapal. Semua kapal yang datang dan berangkat berasal dari pelabuhan/negara sehat, lokal transmisi dan dinyatakan bebas dari kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau faktor risikonya.
2. Pengawasan lalu lintas jenazah dilaksanakan sebanyak 10 jenazah dengan menerbitkan sebanyak 9 surat izin lalu lintas jenazah dan 1 abu jenazah. Sedangkan kegiatan pengawasan dan penerbitan surat izin *health certificate* OMKABA sebanyak 524 dokumen dengan rincian 521 *health certificate* sedangkan 3 dokumen diterbitkan dari hasil pemeriksaan sampel makanan ke BBPOM Pekanbaru.
3. Telah dilaksanakan penerbitan dokumen kesehatan kapal meliputi CoP sebanyak 6.390 dokumen, PHQC sebanyak 41.764 dokumen, SSCEC sebanyak 1.012 dokumen, SSCC sebanyak 3 dokumen, Buku Kesehatan Kapal (*Health Book*) sebanyak 707 buku.
4. Kegiatan Surveilans epidemiologi dilakukan terhadap ABK, penumpang kapal/pesawat yang datang dari luar maupun dalam negeri. Sedangkan untuk surveilans wilayah

dilakukan pengumpulan data pada unit pelayanan kesehatan yang ada di sekitar wilayah perimeter dan buffer pada masing-masing wilayah kerja KKP Kelas II Dumai. Hasil pengamatan dari kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya ABK, Penumpang yang terindikasi menderita penyakit yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Data yang didapat dari unit pelayanan kesehatan non KKP juga menunjukkan tidak adanya penyakit karantina dan potensial wabah.

5. Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) dilakukan setelah dilakukan vaksinasi Meningitis yaitu untuk keperluan calon jemaah umrah yaitu sebanyak 137 dokumen sedangkan 41 dokumen diberikan kepada pelaku perjalanan internasional yang memerlukan vaksinasi Yellow Fever.
6. Pengawasan lalu lintas OMKABA dilakukan terhadap komoditi dari jenis makanan dengan hasil pemeriksaan sampel di BBPOM Pekanbaru didapatkan kesimpulan tidak mengandung formalin sedangkan hasil pemeriksaan sampel yang berasal dari kapal kargo/tanker yang diperiksa oleh LABKESDA Pekanbaru didapatkan kesimpulan tidak tercemar E-Colli begitu juga dengan sampel yang diperiksakan ke BBPOM Pekanbaru tidak mengandung Formalin.
7. Jejaring kerja dan kemitraan dilakukan dengan instansi terkait telah berjalan dengan cukup baik yaitu dengan pihak KSOP, dinas kesehatan, Imigrasi, bea dan cukai, kepolisian, agen pelayaran, dan sektor terkait lainnya.

Pada kurun waktu tahun 2023 telah dilakukan berbagai kegiatan dan upaya dalam mendukung program pencegahan dan pengendalian penyakit, kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dicerminkan dari kinerja tiap kegiatan di dalamnya dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Uraian berikut akan menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran setiap kegiatan Substansi PRL dalam lingkup program pencegahan dan pengendalian penyakit.

1. Layanan Pengendalian Risiko Lingkungan

Bandar Udara maupun Pelabuhan merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk kapal, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit. Merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (new emerging diseases), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (re-emerging diseases). Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negatif dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, sosial budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah. Pengelolaan sanitasi lingkungan pelabuhan merupakan kegiatan untuk menciptakan lingkungan di wilayah pelabuhan sesuai standar, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kegiatan sanitasi lingkungan (environmental sanitation) adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau

dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia berkaitan dengan pengelolaan sanitasi yang baik.

Kantor Kesehatan Pelabuhan dituntut untuk mampu menangkal risiko kesehatan yang mungkin masuk melalui orang, alat angkut dan barang termasuk kontainer dari negara lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan. Kegiatan pengendalian risiko lingkungan, merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh KKP dalam rangka menangkal dan mencegah penyebaran faktor risiko kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan di KKP kelas II Dumai di bagian sanitasi lingkungan meliputi, Pengawasan sanitasi alat angkut, Pengawasan Pembuangan Limbah/Sampah, Pengawasan Kualitas Udara, Pengawasan Penyediaan air bersih, pengawasan sanitasi gedung dan bangunan umum, pengawasan hygiene sanitasi makanan di pelabuhan yang merupakan upaya-upaya penyehatan lingkungan dalam mencegah penyebaran penyakit karantina dan penyakit potensial wabah melalui pengawasan dan perbaikan sarana kesehatan. Sehingga kegiatan yang dilakukan dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan.

a) Pengawasan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan

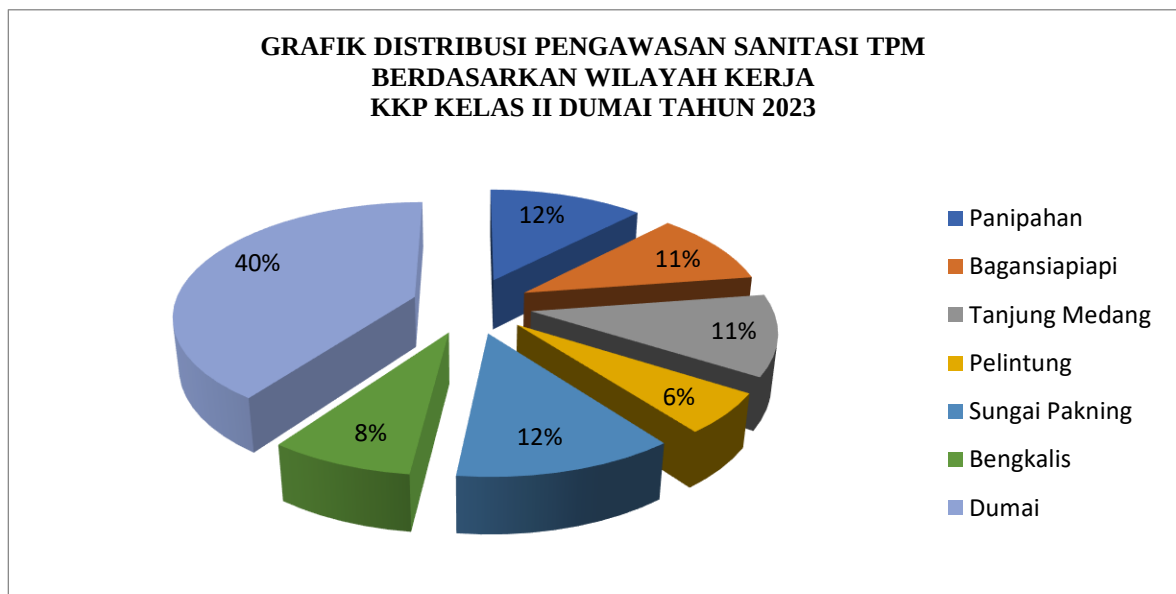
Inspeksi sanitasi terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dilakukan di delapan pelabuhan. Kegiatan dilakukan dengan observasi dan pemeriksaan kualitas lingkungan pada TPM seperti pemeriksaan sampel makanan dengan *test kit* dan observasi penjamah makanan. Kegiatan ini fokus pada TPM yang berada di wilayah perimeter pelabuhan. Pada tahun 2023 volume kegiatan sebanyak 54 layanan inspeksi TPM telah dilaksanakan dengan uraian pada tabel dibawah ini.

**TABEL DISTRIBUSI PENGAWASAN SANITASI TPM
KKP KELAS II DUMAI TAHUN 2023**

No	Wilker	Gol. TPM			Kondisi Sanitasi		JML	Jumlah Karyawan					JML
		A1	A2	B	M S	TM S		S 1	D3	SLT A	SLT P	SD	
1	Panipahan	-	52	-	52	-	52	-	-	25	35	29	89
2	Bagansiapi	44			44		44			52	6	24	82
3	Tanjung Medang	48			48		48			36	48	12	96
4	Pinang Kampai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelintung		24		24		24		19	163	5		187
6	Sungai Pakning		52		51	1	52		8	57	15	10	89
7	Bengkalis	34	-	-	-	34	34	-	-	19	7	8	34

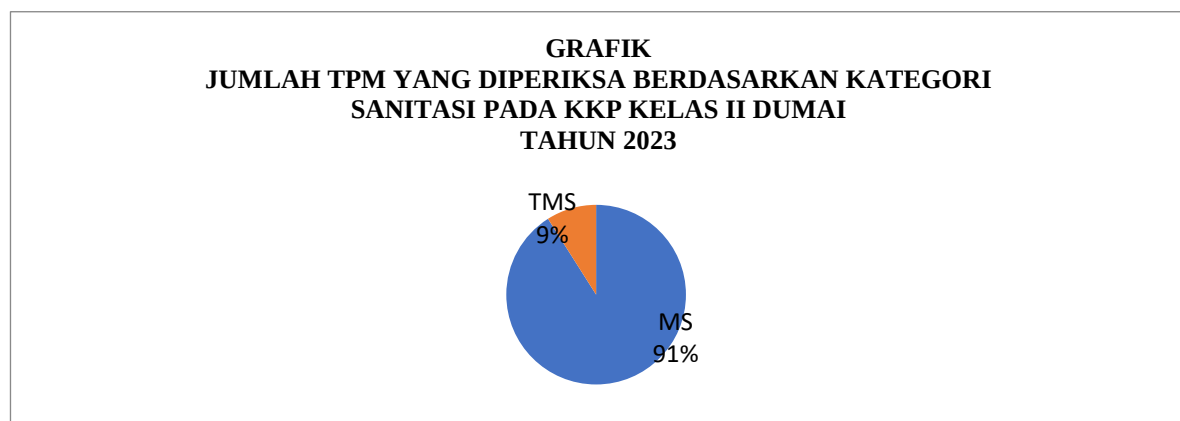
8	Dumai	130	39	-	167	3	170	21		222	27	39	310
		256	167		386	38	424	21	27	574	143	122	887

Pada tahun 2023 jumlah TPM yang diawasi oleh KKP Kelas II Dumai berjumlah 424 TPM termasuk juga di wilayah kerja KKP Kelas II Dumai. Distribusinya dapat dilihat pada grafik berikut ini

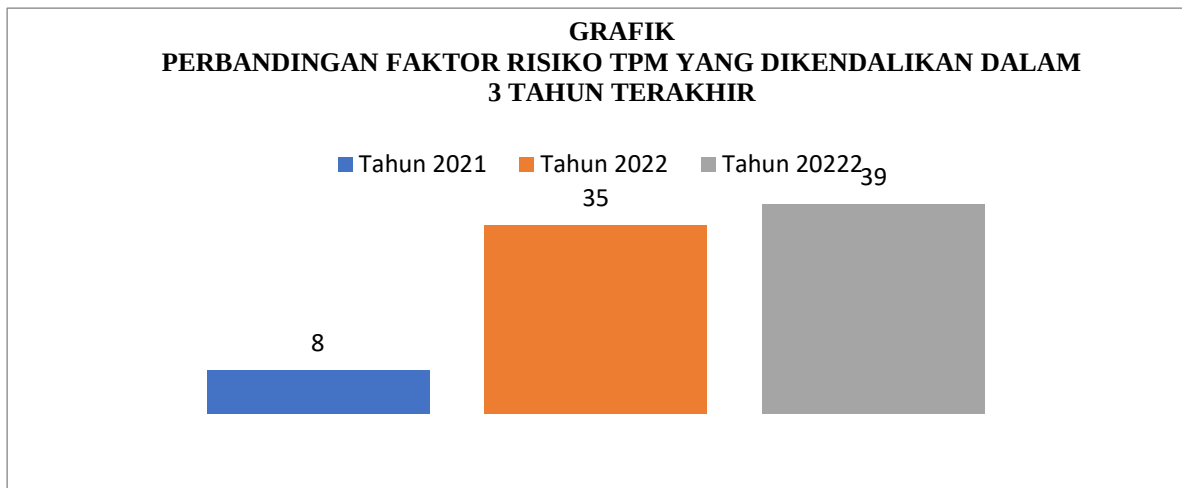


Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa pengawasan sanitasi/IKL TPM paling banyak dilakukan di Pelabuhan Dumai yaitu sebesar 40% dari total TPM yang diperiksa dan diawasi.

Untuk kategori kondisi sanitasi TPM yang diperiksa dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa sebanyak 91% TPM dengan kategori memenuhi syarat sanitasi dan 9% TPM dengan kategori tidak memenuhi syarat sanitasi.



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah TPM dengan faktor risiko pada tahun 2023 sebanyak 39 kali pengendalian TPM. Ada kenaikan yang cukup signifikan dalam pengendalian faktor risiko pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dengan kenaikan sebanyak 4 kegiatan pengendalian.

b) Pengawasan Sanitasi Gedung/Bangunan

Pengawasan hygiene gedung dan bangunan umum di pelabuhan merupakan salah satu upaya penyehatan lingkungan dalam mencegah penyebaran penyakit karantina dan penyakit potensial wabah melalui pengawasan dan perbaikan sarana kesehatan di perkantoran dan industri serta tempat-tempat umum lainnya.

Pengamatan hygiene sanitasi gedung dan bangunan umum di Bandar udara maupun pelabuhan adalah pengawasan terhadap kondisi dari komponen atau bagian-bagian bangunan serta fasilitas pendukungnya yang ada di Bandar udara/ pelabuhan laut dari kemungkinan timbulnya masalah kesehatan. Ruang lingkup dari pengawasan hygiene gedung/bangunan umum di Bandar udara/pelabuhan laut meliputi kondisi fisik bangunan gedung dan halaman, penanganan sampah, sarana pembuangan air limbah, vektor dan perilakunya.

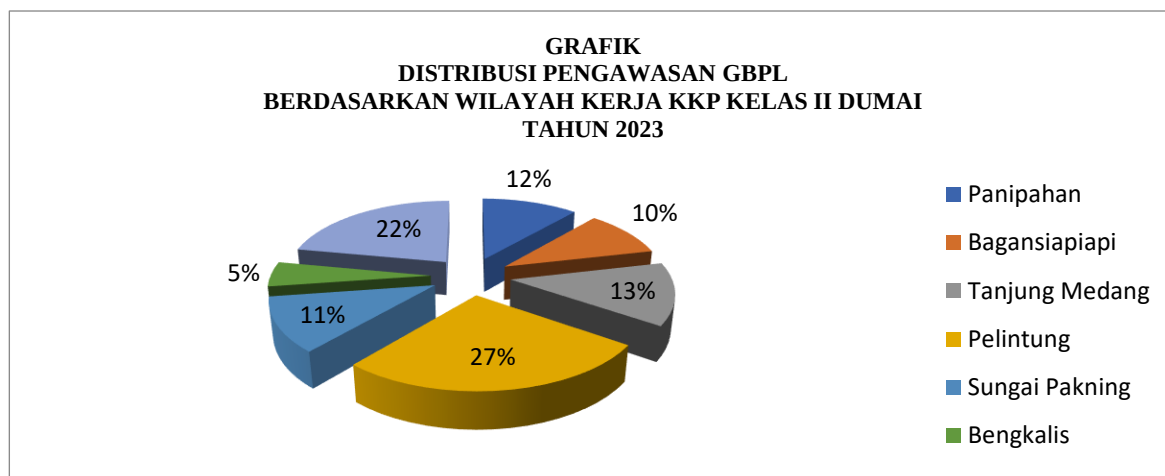
Pengamatan Hygiene sanitasi bangunan di pelabuhan Dumai menggunakan formulir pemeriksaan sesuai SOP, hanya untuk memudahkan fokus dalam pengamatan, hasil pengamatan dibagi dalam 3 bagian yaitu bagian luar bangunan, bagian dalam bangunan dan perilaku karyawan. Untuk perilaku karyawan di dapat dari hasil wawancara dengan pengelola bangunan.

Inspeksi sanitasi terhadap Tempat-Tempat Umum (TTU) dilakukan di delapan pelabuhan. Kegiatan dilakukan dengan observasi dan pemeriksaan kualitas lingkungan pada TTU. Kegiatan ini fokus pada gedung, bangunan dan lingkungan yang berada di wilayah perimeter pelabuhan. Pada tahun 2023 volume kegiatan sebanyak 54 layanan inspeksi TTU telah dilaksanakan dengan uraian pada grafik dibawah ini.

**TABEL DISTRIBUSI PENGAWASAN SANITASI TTU
KKP KELAS II DUMAI TAHUN 2023**

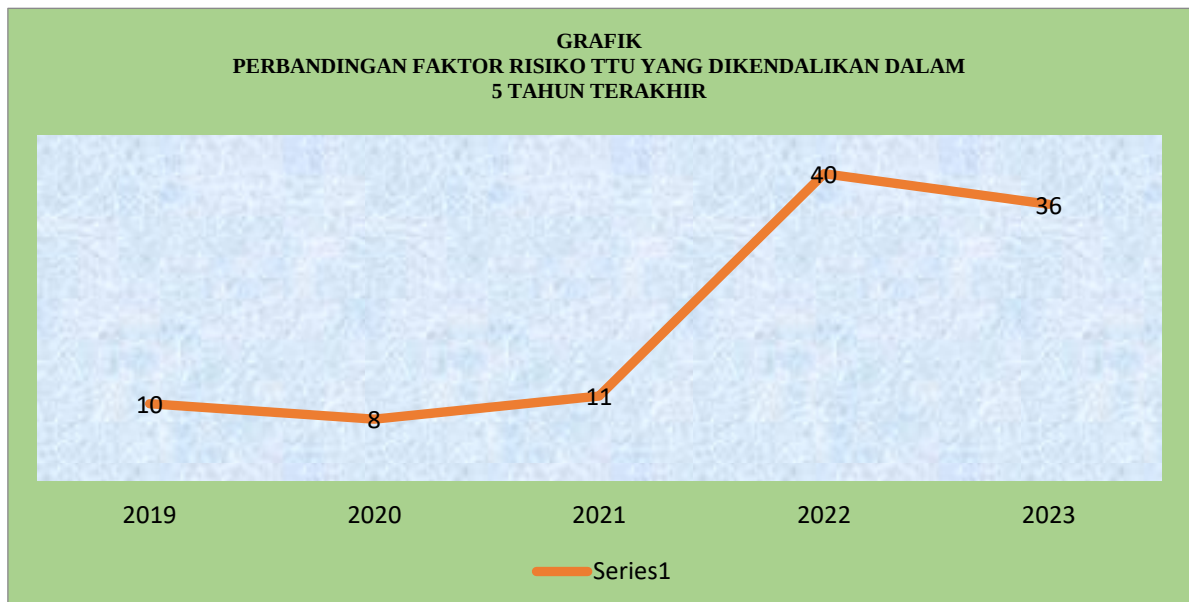
No	Wilker	Jenis TTU						Sanitasi		JML
		Kantor	Gudang	Terminal	Hotel	Pujasera	R.Ibadah	MS	TMS	
1	Panipahan	48	14	0	12			74		74
2	Bagansiapiapi	38	27					53	12	65
3	Tanjung Medang	61	24					85		85
4	Pinang Kampai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelintung							168	6	174
6	Sungai Pakning	26	12	12		12	12	74		74
7	Bengkalis	12		12			10	34		34
8	Dumai	110		31			2	125	18	143
		295	77	55	12	12	24	445	36	649

Pada kegiatan pengamatan hygiene sanitasi gedung dan bangunan wilayah kerja KKP Kelas II Dumai tahun 2023 telah dilakukan oleh seluruh wilayah kerja yang ada di lingkungan KKP Kelas II Dumai. Secara total pada tahun 2023 pengawasan gedung dan bangunan telah dilakukan terhadap 649 (enam ratus empat puluh sembilan) bangunan, yang terdapat di wilayah-wilayah kerja KKP Kelas II Dumai. Distribusinya dapat dilihat pada grafik berikut ini :





Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa sebanyak 649 TTU telah diperiksa pada tahun 2023. Sebanyak 94% TTU dengan kategori memenuhi syarat kesehatan dan 6% TTU dengan kategori tidak memenuhi syarat kesehatan



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah TTU dengan faktor risiko pada tahun 2023 sebanyak 36 TTU. Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan jumlah TTU yang dengan faktor risiko yang dikendalikan pada tahun 2022.

c) Pengawasan Penyediaan Air Bersih

Untuk melindungi masyarakat pelabuhan khususnya dan Indonesia umumnya dari faktor risiko lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan, salah satunya adalah dengan tersedianya air bersih yang memenuhi syarat kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, untuk itu dibutuhkan pengawasan penyediaan air bersih yang meliputi penilaian kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi serta penilaian tehnik penyediaan air bersih/air minum di dalam kapal.

Pengawasan penyediaan air bersih merupakan kegiatan yang berkelanjutan dimulai dari pengumpulan data, pengolahan serta analisis dan interpretasi terhadap sarana dan

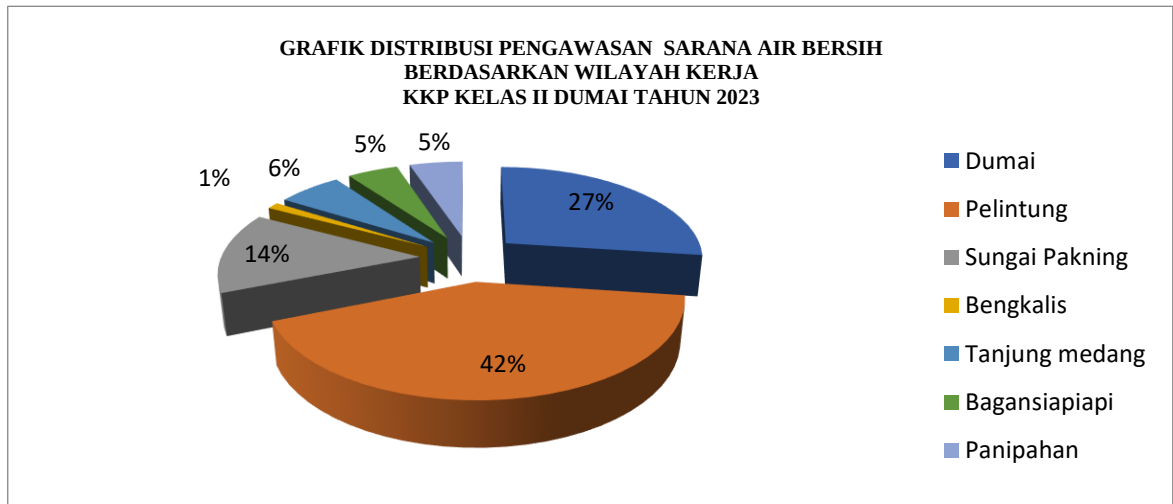
kualitas air bersih serta faktor risiko yang berperan pada terjadinya perubahan kualitas air yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan hasilnya dapat dipakai untuk tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Pemeriksaan sarana air bersih di kapal dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sanitasi kapal dalam rangka pembaharuan Sertifikat Sanitasi kapal. Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan secara langsung dengan metode observasi terhadap sarana air bersih dan pemeriksaan sampel dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan diterbitkan sertifikat air bersih untuk kapal tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi ; pemeriksaan fisik, pemeriksaan kimia dan pemeriksaan sarana air bersih. Sementara untuk pemeriksaan sampel air langsung dilakukan di lapangan sesuai dengan peralatan yang tersedia seperti pH dan sisa Chlor. Dari sejumlah sarana dan sampel yang diperiksa semuanya memenuhi syarat yang ditentukan. Jumlah sarana air bersih yang di periksa selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL JUMLAH SARANA AIR BERSIH YANG DIAWASI
BERDASARKAN WILAYAH KERJA
TAHUN 2023**

No	Wilayah Kerja	Jumlah	Kondisi Sanitasi		Ket.
			MS	TMS	
1	Dumai	212	212	-	
2	Pelintung	327	327	-	
3	Sungai Pakning	108	108	-	
4	Bengkalis	9	9	-	
5	Tanjung medang	48	48	-	
6	Bagansiapiapi	38	38	-	
7	Panipahan	40	40	-	
8	Bandara Pinang Kampai	-	-	-	
	Jumlah	782	782	0	

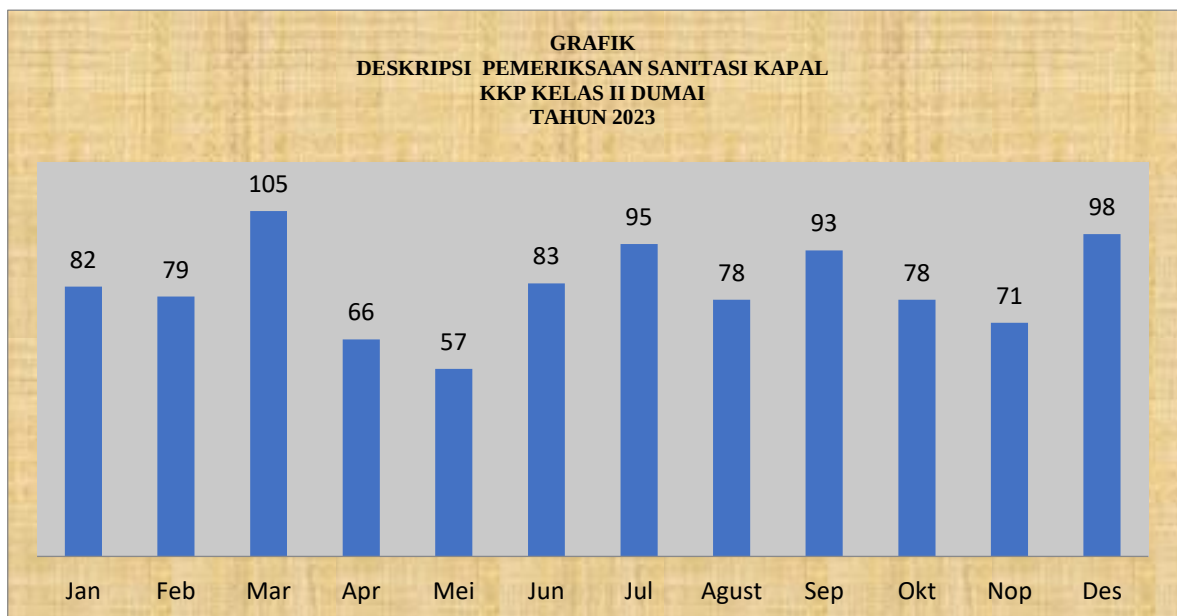
Grafik dibawah ini adalah grafik distribusi pengawasan sarana air bersih berdasarkan wilayah kerja di KKP Kelas II Dumai, Dimana wilayah kerja terbanyak melaksanakan pengawasan SAB tersebut adalah wilayah kerja induk Pelintung sebanyak 42% dan diikuti oleh wilayah kerja Dumai sebanyak 27%. Pengawasan Sab paling sedikit dilakukan oleh wilker Pinang kampai, hal ini disebabkan karena sarana air bersih disana yang memang sedikit dan kegiatan penerbangan di bandara yang juga sedikit. Adanya wilayah kerja yang masih sedikit melaksanakan pengawasan penyediaan air bersih ini, selain karena tidak adanya anggaran pengawasan yang tersedia untuk wilayah-wilayah kerja tersebut, juga ada wilayah-wilayah kerja yang pelabuhannya tidak ada tersedia pensuplay air bersih.



Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa semua wilayah kerja melaksanakan pengawasan penyediaan air bersih. Pengawasan penyediaan air bersih terbanyak dilakukan oleh wilayah kerja pelabuhan induk Pelintung sebesar 42% dari total pengawasan yang dilakukan oleh KKP Dumai Kelas II Dumai.

d) Pemeriksaan Sanitasi Kapal

Pengawasan sanitasi kapal dilakukan untuk semua jenis kapal baik kapal penumpang, maupun kapal barang. Pemeriksaan sanitasi kapal dilakukan setiap kedatangan kapal dari luar negeri dan daerah terjangkau, keberangkatan yang dilakukan diseluruh wilayah kerja KKP Kelas II Dumai pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa pemeriksaan sanitasi kapal paling banyak dilakukan pada bulan Maret yaitu sebanyak 105 kali pemeriksaan. Pada Tahun 2023

ada temuan 3 kapal dengan sanitasi Tidak Memenuhi Syarat dan dilakukan tindakan penyehatan.

e) Tindakan Penyehatan Alat Angkut

Pada saat ini dunia telah dihebohkan dengan terjadinya wabah penyakit menular yang disebabkan oleh sejenis virus yang dikenal dengan nama covid19. Penyebarannya begitu massif dan telah memakan banyak korban jiwa. WHO sebagai organisasi dunia dibidang kesehatan telah menetapkan sebagai Pandemi. Dengan ditetapkannya Covid19 menjadi Pandemi maka kewajiban setiap Negara untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi penyebaran yang di Negara masing-masing. Bandara/pelabuhan adalah lokasi dengan potensi penyebaran virus yang sangat tinggi mengingat keluar/masuknya orang-orang dari berbagai Negara/daerah. Sehingga perlu mendapatkan dukungan berbagai lini untuk melakukan aksi pencegahan.

KKP sebagai institusi yang berfungsi dalam cegah tangkal penyakit di pintu masuk Negara juga melakukan upaya pencegahan penyakit yang dibawa oleh alat angkut dengan melakukan tindakan penyehatan alat angkut. Tindakan penyehatan yang dilakukan berupa desinfeksi, desinseksi, derratisasi/fumigasi. Pada tahun 2023 ini pelaksanaan tindakan penyehatan kapal sebagai berikut :

**TABEL PELAKSANAAN TINDAKAN PENYEHATAN ALAT ANGKUT
KKP KELAS II DUMAI TAHUN 2023**

N O	BULAN	TINDAKAN PENYEHATAN			JUM LAH
		DESINFE KSI	DESINSE KSI	FUMIG ASI	
1	Januari	-	-	1	1
2	Februari	-	-	1	1
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	Septem	-	1	-	1
ber					
1	Oktober	-	-	-	-
0					
1	Novemb	-	-	-	-
1	er				
1	Desemb	-	-	-	-
2	er				

Jumlah	-	1	2	3
--------	---	---	---	---

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa di KKP Kelas II Dumai pada tahun 2023 telah dilakukan tindakan penyehatan terhadap kapal sebanyak 3 (tiga) kali. Tindakan penyehatan kapal yang dilaksanakan di KKP Kelas II Dumai dilakukan atas dasar permintaan owner kapal, kegiatan rutin dan karena adanya temuan di kapal.

TABEL
CAPAIAN INDIKATOR 3 KKP KELAS II DUMAI
TAHUN 2023

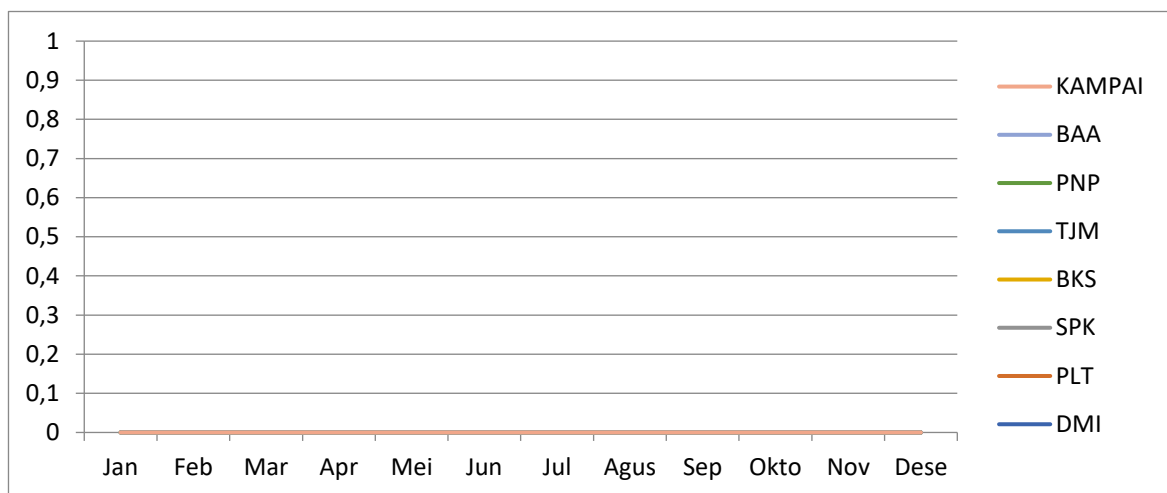
NO	Parameter	TARGET %	CAPAIAN %
1	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	100	100
2	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	100	100
3	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	100	100
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	100	100
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	100	100
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	100	100
7	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	100	100
8	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	100	100
9	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	100	100

dengan minimal 2 kali pemeriksaan
kimia lengkap dan 6 kali
mikrobiologi/bakteriologis

2) *Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1*

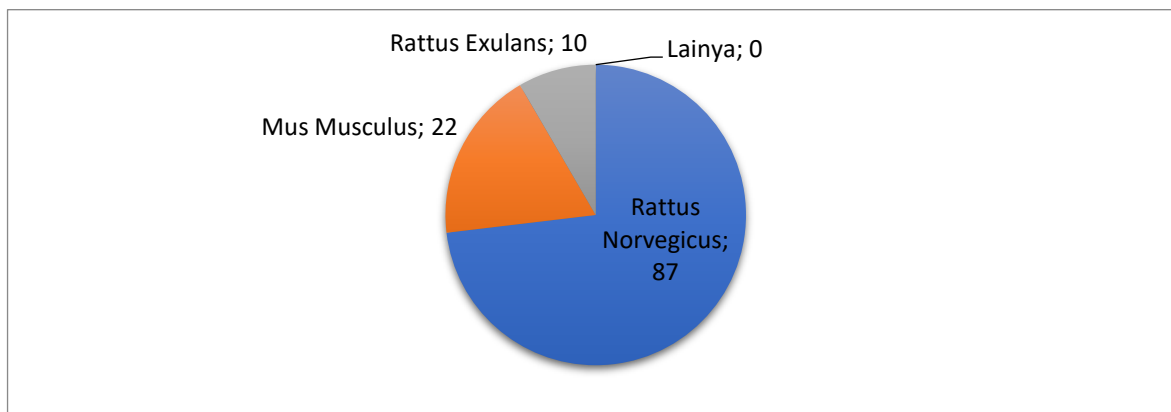
Indeks pinjal khusus adalah jumlah pinjal *Xenopsylla cheopis* dibagi dengan jumlah tikus yang tertangkap dan diperiksa. Adapun indeks pinjal umum adalah jumlah pinjal umum (semua pinjal) dibagi dengan jumlah tikus yang tertangkap dan diperiksa. Indeks pinjal terdiri dari dua yaitu indeks pinjal khusus dan indeks pinjal umum. Indeks pinjal khusus adalah jumlah pinjal *Xenopsylla cheopis* dibagi dengan jumlah tikus yang diperiksa. Indeks pinjal umum adalah jumlah pinjal yang tertangkap dibagi dengan jumlah tikus yang diperiksa.

GRAFIK
INDEKS PINJAL BERDASARKAN PELABUHAN PADA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa indeks pinjal pada delapan pelabuhan sebesar 0% atau dibawah <1 . Survei Vektor Pes dilakukan sebanyak 72 layanan yang tersebar pada delapan pelabuhan dengan jumlah 28.800 perangkat yang telah dipasang. Sepanjang tahun 2023, sebanyak 119 ekor tikus tertangkap dan dilakukan identifikasi untuk pemeriksaan pinjal.

GRAFIK JENIS TIKUS TERTANGKAP DALAM SURVEI PES TAHUN 2023

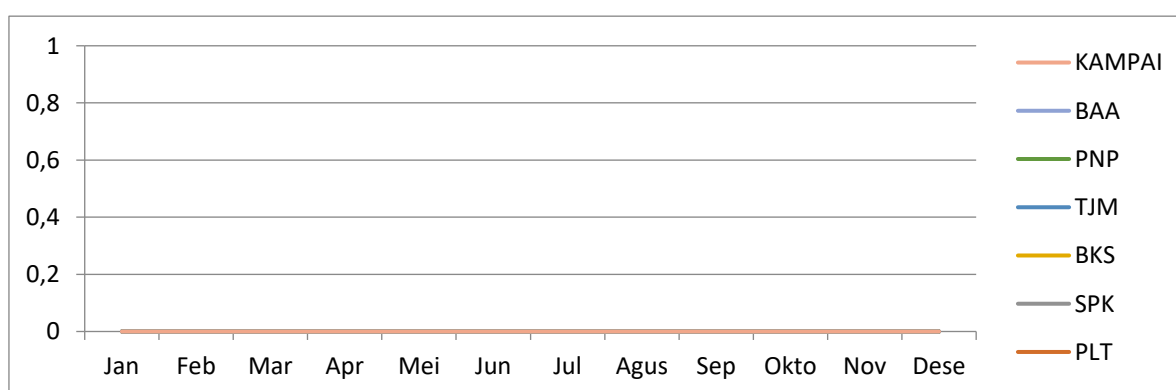


Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jenis tikus *Rattus Norvegicus* menjadi jenis tikus dengan jumlah terbanyak yang tertangkap dalam survey vektor Pes. Jumlah *Rattus musculus* yang tertangkap sebanyak 22 ekor, disusul dengan *Rattus Musculus* dengan 22 ekor, *Rattus Exulans* 10 ekor.

3) Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)

Keberadaan larva *Anopheles* dilihat dari nilai indeks habitat. Indeks habitat adalah persentase habitat perkembangbiakan yang positif larva *Anopheles*, dihitung dengan cara jumlah habitat yang positif larva dibagi dengan jumlah seluruh habitat yang diamati dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2023 total sebanyak 14 layanan survei vektor malaria telah dilaksanakan dengan uraian hasil pada grafik dibawah ini.

GRAFIK INDEX HABITAT ANOPHELES BERDASARKAN PELABUHAN PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI

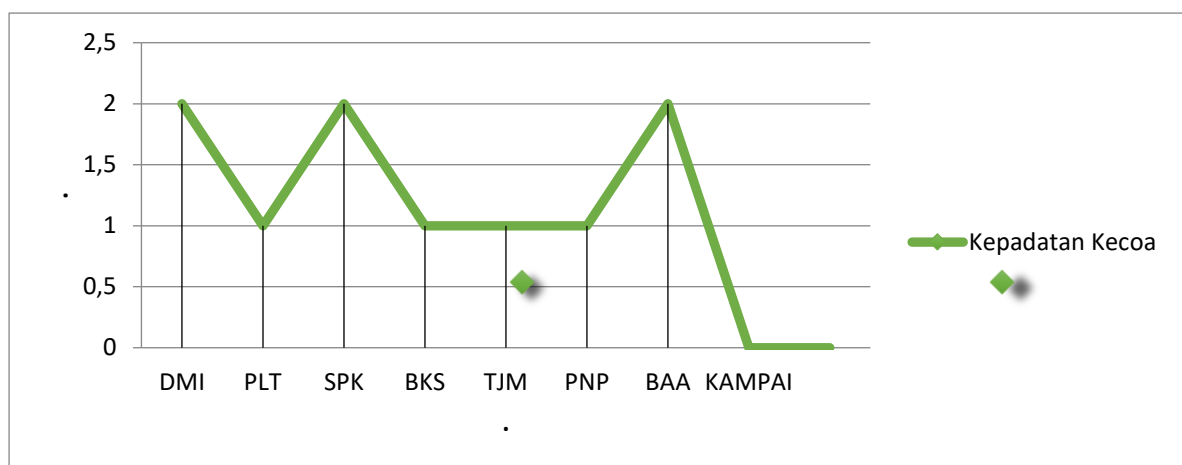


Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa tidak ditemukan genangan atau galian yang menjadi tempat perkembangbiakan larva *Anopheles*.

4) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2

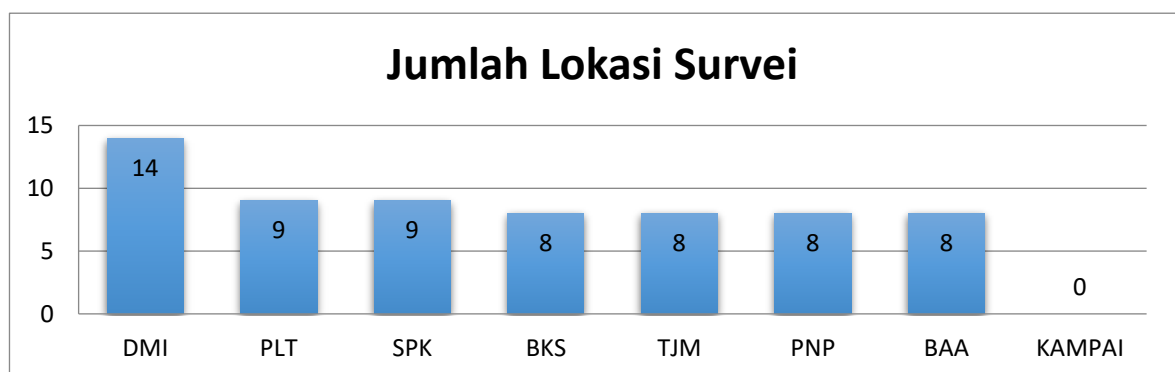
Kepadatan kecoa mengacu kepada indeks populasi kecoa. Indeks populasi kecoa adalah angka rata-rata populasi kecoa, yang dihitung berdasarkan jumlah kecoa tertangkap per perangkap per malam menggunakan perangkap lem (sticky trap). Survei Kecoa dilakukan terhadap keberadaan ooteka, *nympa* dan kecoa dewasa pada tempat pengelolaan pangan dan tempat – tempat umum. Pada tahun 2023 sebanyak 64 layanan survei vektor diare telah dilaksanakan dengan uraian hasil pada grafik dibawah ini;

**GRAFIK INDEX POPULASI KECOA BERDASARKAN PELABUHAN
PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI**



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa nilai index populasi kecoa < 2 pada delapan pelabuhan yang menunjukkan bahwa index populasi dibawah nilai baku mutu. Survei dilakukan pada delapan pelabuhan yang dilakukan pada sore dan malam hari. Jumlah lokasi survei diuraikan pada pada grafik dibawah ini.

**GRAFIK JUMLAH LOKASI SURVEI BERDASARKAN PELABUHAN
PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI**

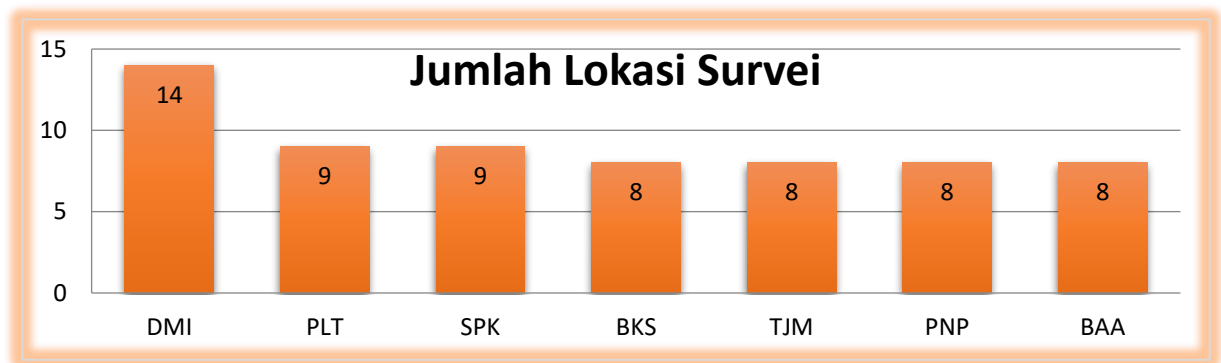


Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pada 64 lokasi yang tersebar pada delapan wilayah kerja pelabuhan. Pelabuhan Dumai menjadi pelabuhan dengan lokasi survei terbanyak dalam melakukan survei.

5) *Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2*

Indeks populasi lalat adalah angka rata-rata populasi lalat pada suatu lokasi yang diukur dengan menggunakan flygrill. Dihitung dengan cara melakukan pengamatan selama 30 detik dan pengulangan sebanyak 10 kali pada setiap titik pengamatan. Dari 10 kali pengamatan diambil 5 (lima) nilai tertinggi, lalu kelima nilai tersebut dirata-ratakan. Survei kepadatan lalat dilakukan terhadap keberadaan lalat dewasa pada tempat pembuangan sampah yang berada pada wilayah perimeter dan buffer. Pada tahun 2023 sebanyak 64 layanan survei kepadatan lalat telah dilaksanakan dengan uraian pada grafik dibawah ini.

**GRAFIK JUMLAH LOKASI SURVEI BERDASARKAN PELABUHAN
PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI**

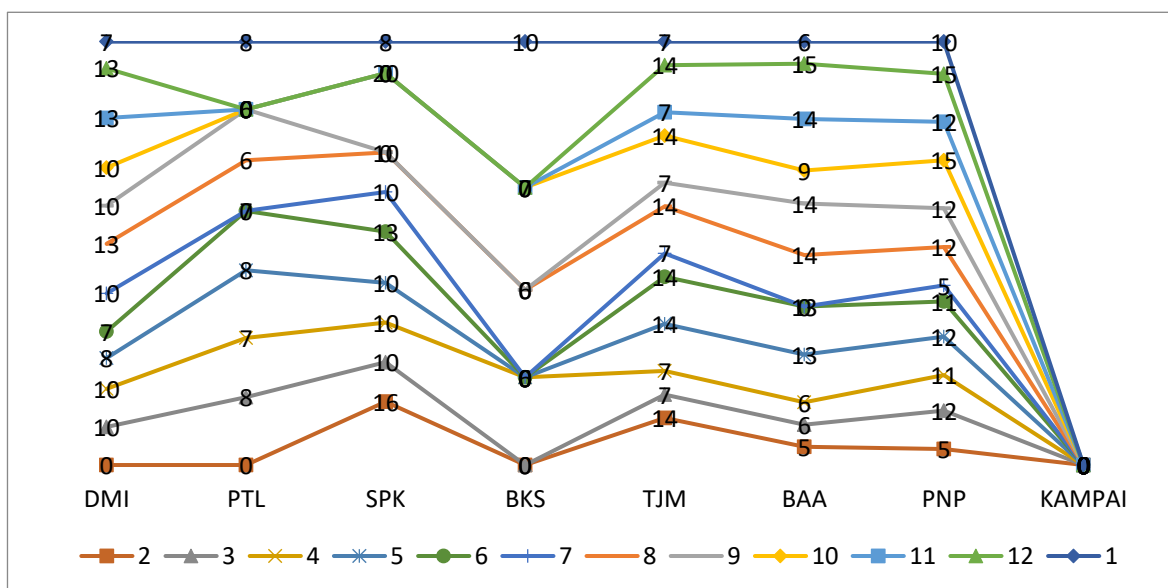


Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2023 telah dilakukan survei pada 64 lokasi yang tersebar pada delapan pelabuhan. Pelabuhan Dumai menjadi pelabuhan dengan jumlah lokasi survei terbanyak yaitu 14 lokasi.

6) *Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0*

House Index (HI) menggambarkan persentase rumah atau bangunan yang bebas jentik, dihitung dengan cara jumlah rumah yang ditemukan jentik dibagi dengan jumlah seluruh rumah yang diperiksa dikali 100%. Yang dimaksud dengan bangunan antara lain perkantoran, pabrik, rumah susun, dan tempat fasilitas umum yang dihitung berdasarkan satuan ruang bangunan/unit pengelolanya. Pada tahun 2023, sebanyak 30 layanan survei vektor DBD telah dilaksanakan uraian hasil pada grafik dibawah ini.

GRAFIK HOUSE INDEX BERDASARKAN PELABUHAN PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI

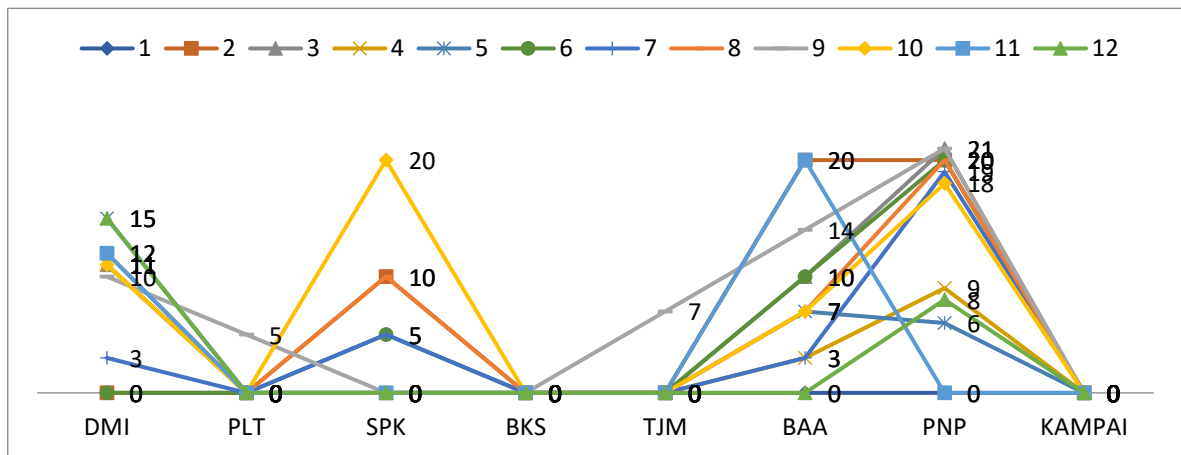


Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa nilai HI mengalami fluktuatif setiap bulannya. Saat survei diminggu pertama dilakukan jika diketahui terdapat infestasi larva pada rumah/bangunan, maka segera dilakukan tindakan pengendalian vektor dengan pemberian larva, *fogging* dan pemasangan ovitrap. Pada akhir tahun nilai HI diperoleh sebesar 0% pada delapan pelabuhan. Dalam survei vektor DBD pada tahun 2023 triwulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.293 gedung/bangunan dan 4.258 kontainer telah diperiksa dan menggunakan Empat kilogram larvasida untuk pengendalian larva *Aedes*. Sebanyak dua belas liter insektisida telah digunakan untuk pengendalian vektor dengan *fogging* dengan capaian luas 15 hektar.

7) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1

House Index (HI) menggambarkan persentase rumah atau bangunan yang bebas jentik, dihitung dengan cara jumlah rumah yang ditemukan jentik dibagi dengan jumlah seluruh rumah yang diperiksa dikali 100%. Yang dimaksud dengan bangunan antara lain perkantoran, pabrik, rumah susun, dan tempat fasilitas umum yang dihitung berdasarkan satuan ruang bangunan/unit pengelolanya di wilayah *Buffer* Pelabuhan. Pada tahun 2023, sebanyak 42 layanan survei vektor DBD telah dilaksanakan dengan uraian hasil pada grafik dibawah ini.

GRAFIK HOUSE INDEX BERDASARKAN PELABUHAN



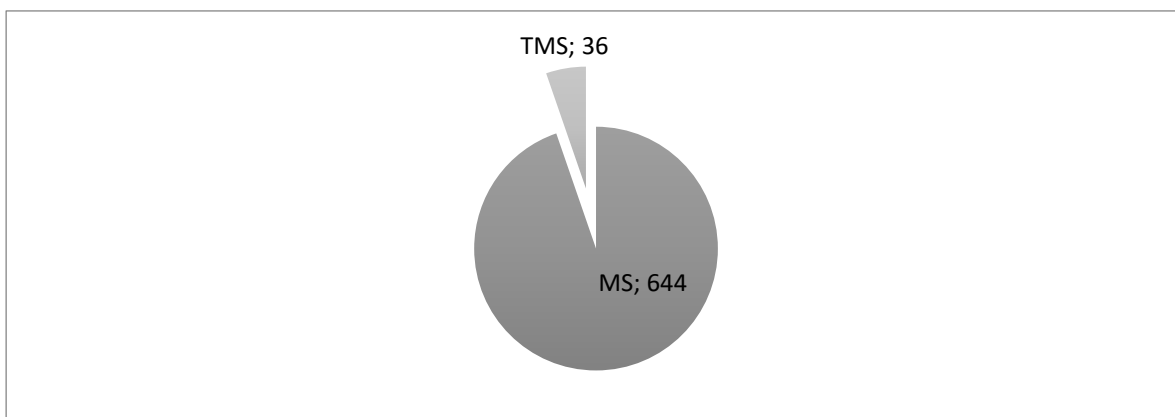
PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa nilai HI mengalami fluktuatif setiap bulannya. Saat survei diminggu pertama dilakukan jika diketahui terdapat infestasi larva pada rumah/bangunan, maka segera dilakukan tindakan pengendalian vektor dengan pemberian larva, *fogging* dan pemasangan ovitrap. Pada tahun 2023 di delapan wilayah kerja pelabuhan. Dalam survei vektor DBD pada tahun 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 536 gedung/bangunan dan 969 kontainer telah diperiksa.

8) *Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan*

Inspeksi sanitasi terhadap Tempat-Tempat Umum (TTU) dilakukan di delapan pelabuhan. Kegiatan dilakukan dengan observasi dan pemeriksaan kualitas lingkungan pada TTU. Kegiatan ini fokus pada gedung, bangunan dan lingkungan yang berada di wilayah perimeter pelabuhan. Pada tahun 2023.

GRAFIK JUMLAH TTU YANG DIPERIKSA BERDASARKAN KATEGORI PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI

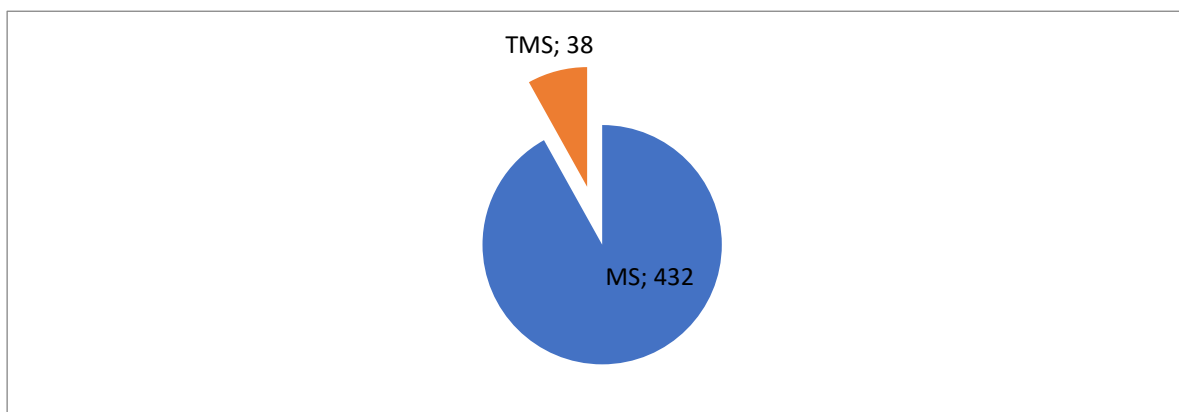


Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa total sebanyak 680 Tempat-tempat umum telah diperiksa pada tahun 2023. Sebanyak 644 TTU dengan kategori memenuhi syarat kesehatan dan 36 TTU dengan kategori tidak memenuhi syarat kesehatan.

9) *Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan*

Inspeksi sanitasi terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dilakukan di delapan pelabuhan. Kegiatan dilakukan dengan observasi dan pemeriksaan kualitas lingkungan pada TPM seperti pemeriksaan sampel makanan dengan *test kit* dan observasi penjamah makanan. Kegiatan ini fokus pada TPM yang berada di wilayah perimeter pelabuhan. Pada tahun 2023 sebanyak 19 layanan inspeksi TPM telah dilaksanakan dengan uraian pada grafik dibawah ini

**GRAFIK JUMLAH TPM YANG DIPERIKSA BERDASARKAN KATEGORI
PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI**



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa sebanyak 470 TPM total yang telah diperiksa pada tahun 2023. Sebanyak 432 TPM dengan kategori memenuhi syarat kesehatan dan 38 TMS dengan kategori tidak memenuhi syarat kesehatan

10) *Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis*

Inspeksi sanitasi terhadap kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali pemeriksaan mikrobiologi dilakukan di delapan wilayah kerja pelabuhan. Kegiatan dilakukan dengan pengambilan sampel air bersih pada sarana air bersih yang ada dipelabuhan dan observasi sumber pencemaran di sekitar sarana air bersih tersebut. Kegiatan ini dilakukan di wilayah perimeter dan buffer pelabuhan. Pada tahun 2023 total sudah sebanyak 5 layanan dengan total pengambilan 50 sampel air bersih telah dilaksanakan.

a. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator

1. Melaksanakan pengendalian faktor risiko kepada alat angkut berupa pengendalian vektor dan air yang terkontaminasi,
2. Melaksanakan pengendalian faktor risiko kepada lingkungan dengan cara meningkatkan pengawasan sanitasi TMS, TPM, Air dan vektor di wilayah pelabuhan dan bandara.
3. Melaksanakan kegiatan pengendalian faktor risiko sesuai dengan SOP dan standar pelayanan yang ditetapkan.

4. Melaksanakan kegiatan pengendalian faktor risiko sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan.

b. Analisa Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut, dan lingkungan pada tahun 2023 disebabkan beberapa hal berikut:

1. Pengawasan yang ketat terhadap kedatangan kapal dan penumpang kapal.
2. Tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana yang cukup dalam melaksanakan kegiatan.
3. Adanya kerjasama yang baik lintas sektoral yaitu dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Institusi Pelabuhan.
4. Optimalisasi jadwal kegiatan (termasuk melaksanakan kegiatan diluar jam dan hari kerja).
5. Optimalisasi SDM yang ada
6. Dukungan kegiatan dari atasan
7. Adanya rapat evaluasi kegiatan secara berkala
8. Optimalisasi jejaring kerja lintas program dan lintas sektor dengan stake holder, pengguna jasa yang berada pada wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.

c. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

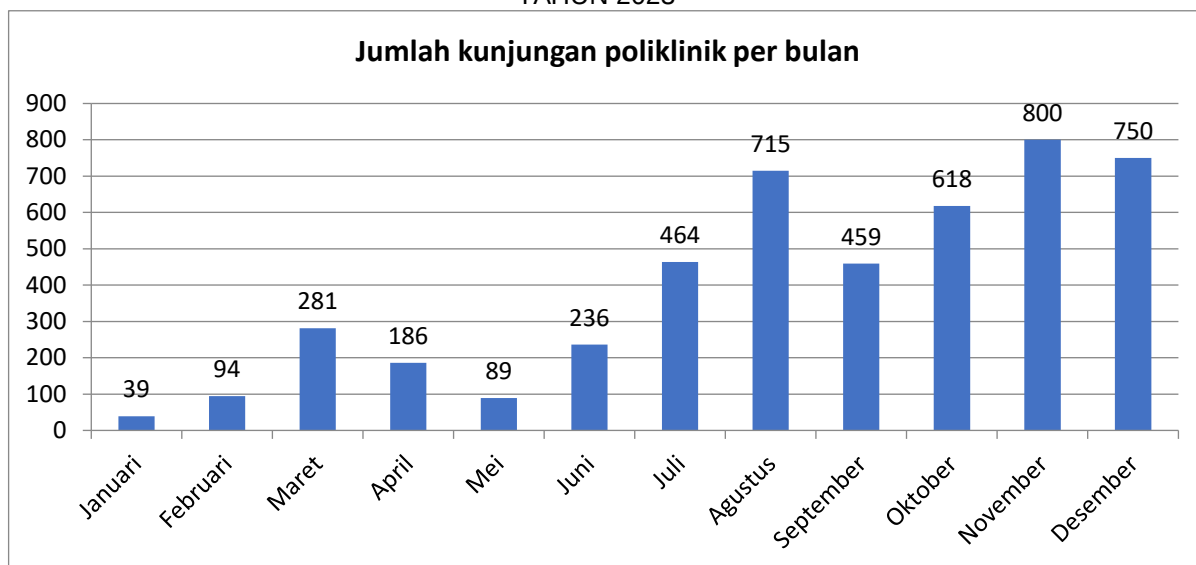
1. Area pemeriksaan / observasi lapangan / survei di wilayah perimeter dan buffer membutuhkan prosedur administrasi yang panjang meskipun kegiatan rutin dilakukan sehingga pemeriksaan/observasi lapangan/survei tidak dapat dilakukan secara insidental.
2. Belum banyak tersedianya Badan Usaha Swasta untuk melakukan kegiatan pengendalian vektor pada alat angkut/kapal di pelabuhan. Terkait perizinan BUS (Badan Usaha Swasta) .
3. Luasnya area pemeriksaan / observasi lapangan / survei membutuhkan jumlah kader terlatih yang lebih banyak.
4. Data pelaporan kegiatan dari wilayah kerja masih belum lengkap secara kuantitas dan kualitas.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran pada UKLW adalah sebagai berikut :

1. Layanan Kunjungan Poliklinik

Pada tahun 2023 jumlah kunjungan poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai adalah 4.731 orang. Kunjungan Poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai berasal dari penumpang kapal, warga sekitar kantor, masyarakat umum dan lintas sektoral di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.

GRAFIK LAYANAN KUNJUNGAN POLIKLINIK KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DUMAI
TAHUN 2023

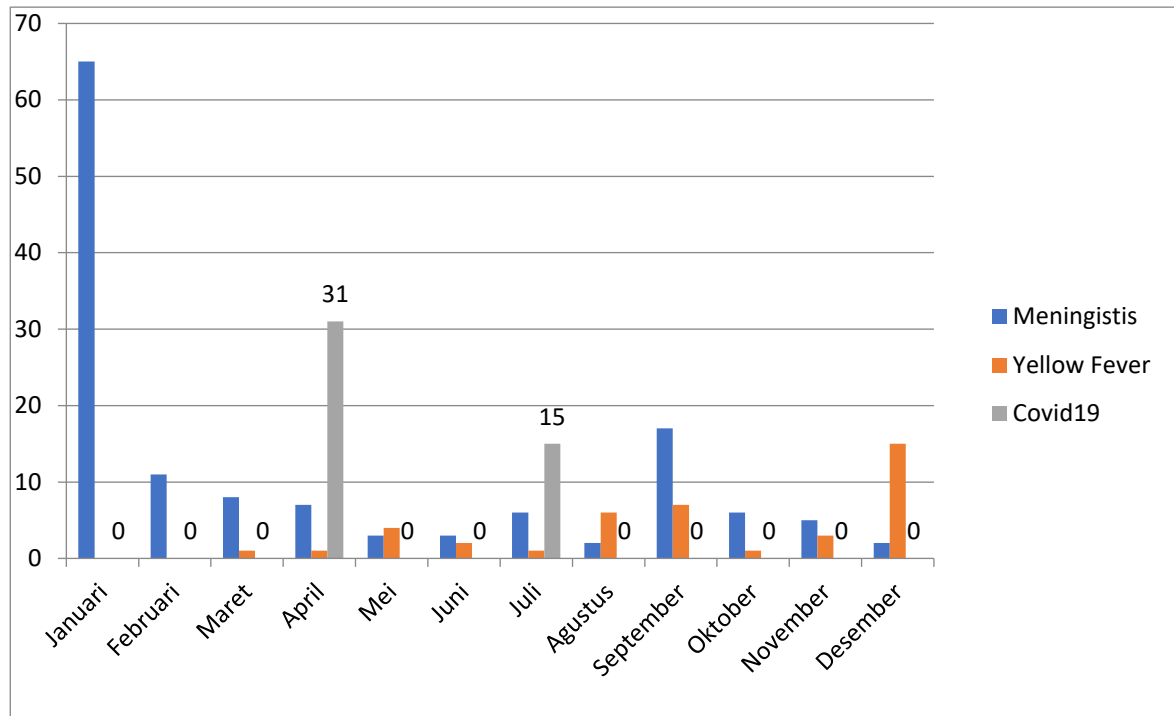


Peningkatan jumlah pemeriksaan orang pada bulan November karena adanya pengobatan massal hari Kesehatan Nasional dan pemeriksaan penumpang pada bulan Desember saat posko Nataru.

2. Pelayanan Imunisasi atau Vaksinasi

Pada Tahun 2023 pelayanan vaksinasi Meningitis Meningococcus di poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sebanyak 135 orang dan vaksinasi yellow fever sebanyak 41 orang, dan pelayanan vaksinasi Covid 19 sebanyak 46 orang.

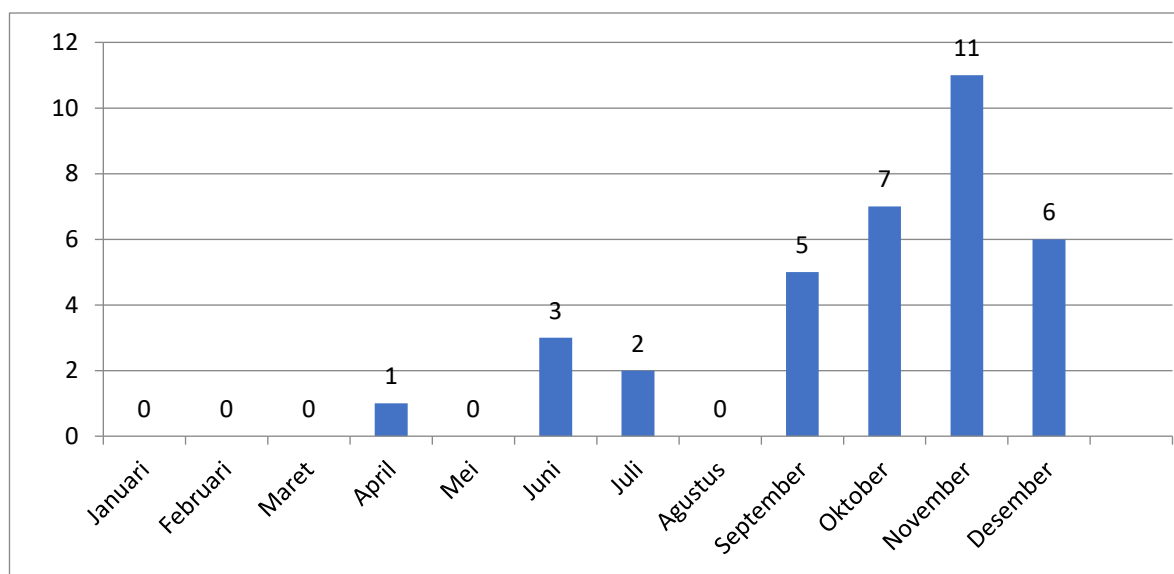
GRAFIK PELAYANAN IMUNISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DUMAI TAHUN 2023



3. Layanan Penerbitan Surat Izin Orang Sakit.

Penerbitan surat izin orang sakit di poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai selama Tahun 2023 sebanyak 35 orang.

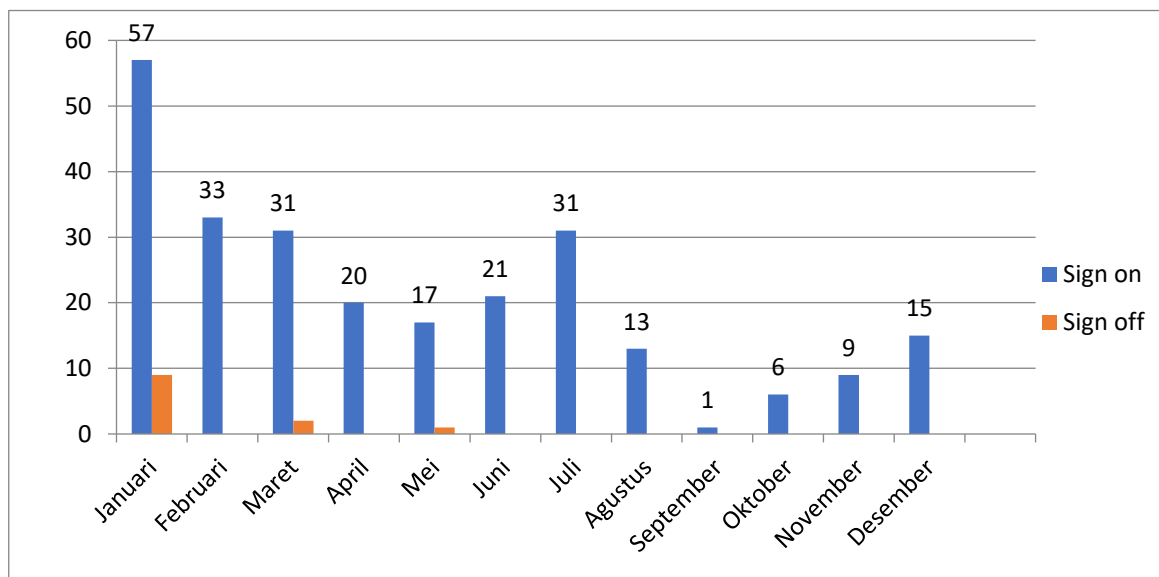
GRAFIK LAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN ORANG SAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DUMAI TAHUN 2023



4. Penerbitan Surat Keterangan Sehat.

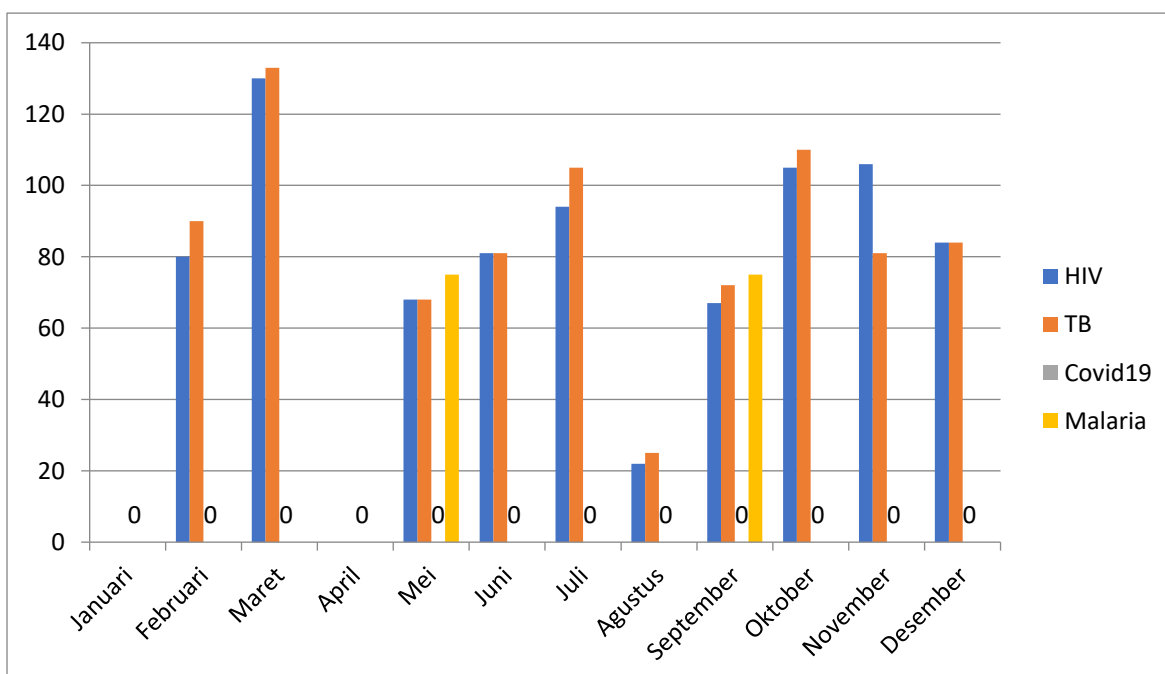
Penerbitan surat keterangan sehat di poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai selama Tahun 2023 sebanyak 266 orang .

GRAFIK LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN SEHAT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DUMAI TAHUN 2023



5. Layanan Deteksi Dini (Skrining)

GRAFIK LAYANAN DETEKSI DINI PENYAKIT HIV AIDS, TB DAN COVID19 DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DUMAI TAHUN 2023



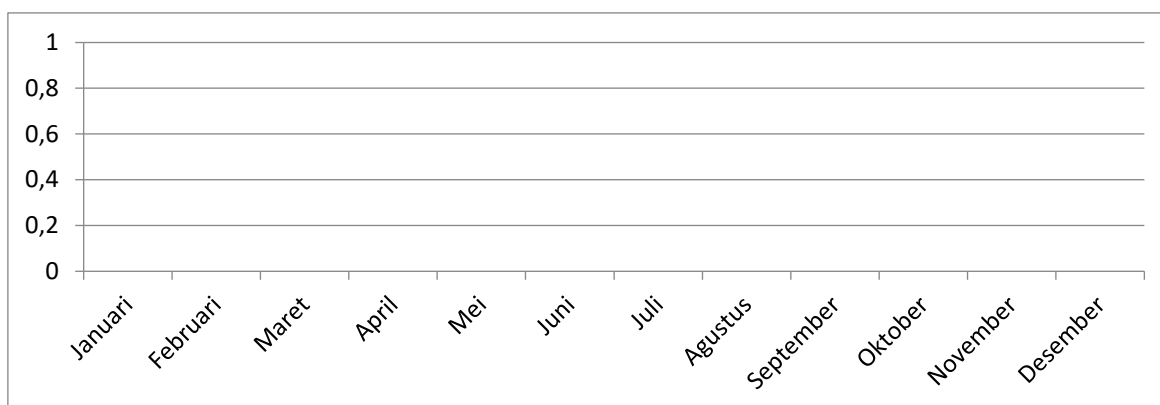
Jumlah orang yang diperiksa HIV dan IMS adalah 837 orang dengan hasil positif 1 orang HIV . Jumlah orang yang diperiksa dahak adalah 849 orang dengan hasil positif TB

sebanyak 4 orang. Jumlah orang yang diperiksa Covid19 adalah 0 orang. Pemeriksaan malaria tahun 2023 di wilker Panipahan sebanyak 150 orang dengan hasil 7 orang reaktif.

6. Penerbitan Surat Layak Terbang

Capaian kinerja penerbitan surat keterangan laik terbang ibu hamil pada Tahun 2023 adalah 0 orang. Hal ini karena tidak adanya jadwal penerbangan komersil selama tahun 2023 di Bandara pinang kampai Dumai. Hal ini didukung dengan adanya kerjasama antara Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dengan maskapai penerbangan. Setiap maskapai penerbangan yang penumpangnya dalam keadaan hamil oleh petugas groundhandling diantar ke konter Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai di bandara untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

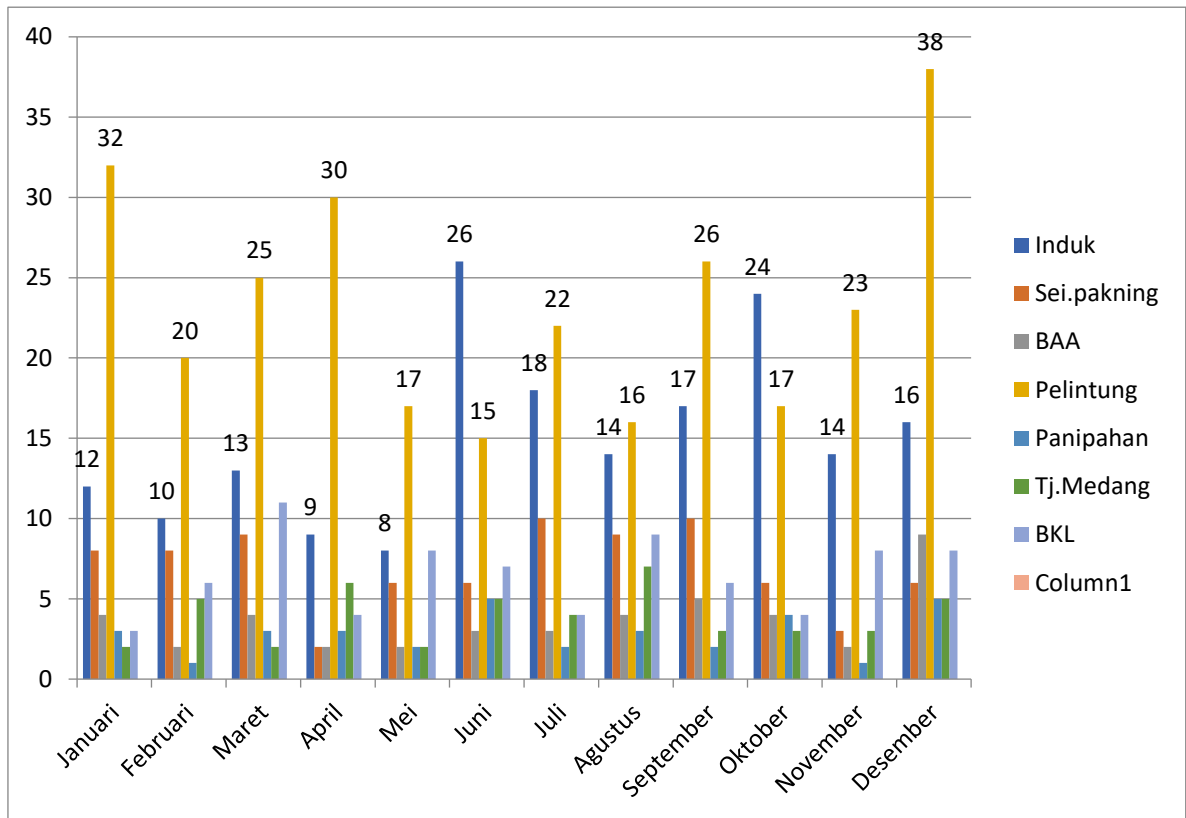
GRAFIK LAYANAN PENERBITAN SURAT LAYAK TERBANG KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DUMAI TAHUN 2023



7. Pelayanan penerbitan sertifikat P3K

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan obat dan alat kesehatan standar di alat angkut dan penerbitan dokumen P3K di Induk sebanyak 181, Sei.pakning sebanyak 83, Bagan Siapiapi sebanyak 44, Pelintung sebanyak 281, panipahan sebanyak 34, Tj.medang sebanyak 47, Bengkalis sebanyak 78. Dengan total dokumen P3k sebanyak 748 sertifikat.

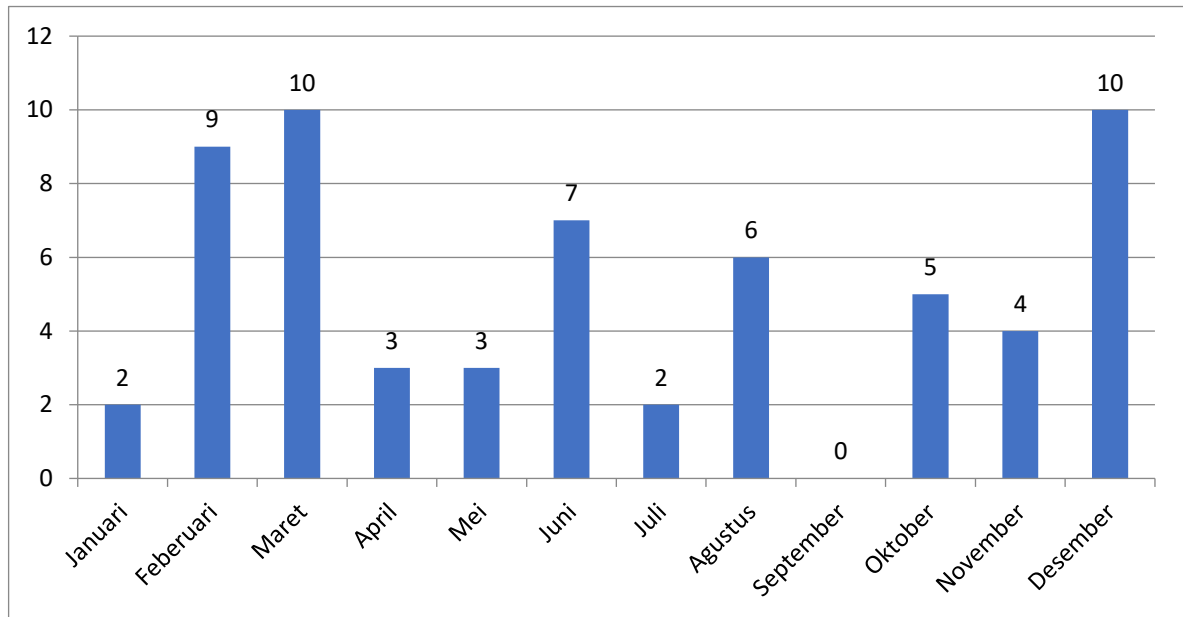
GRAFIK LAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT DAN ALKES DI KAPAL
TAHUN 2023



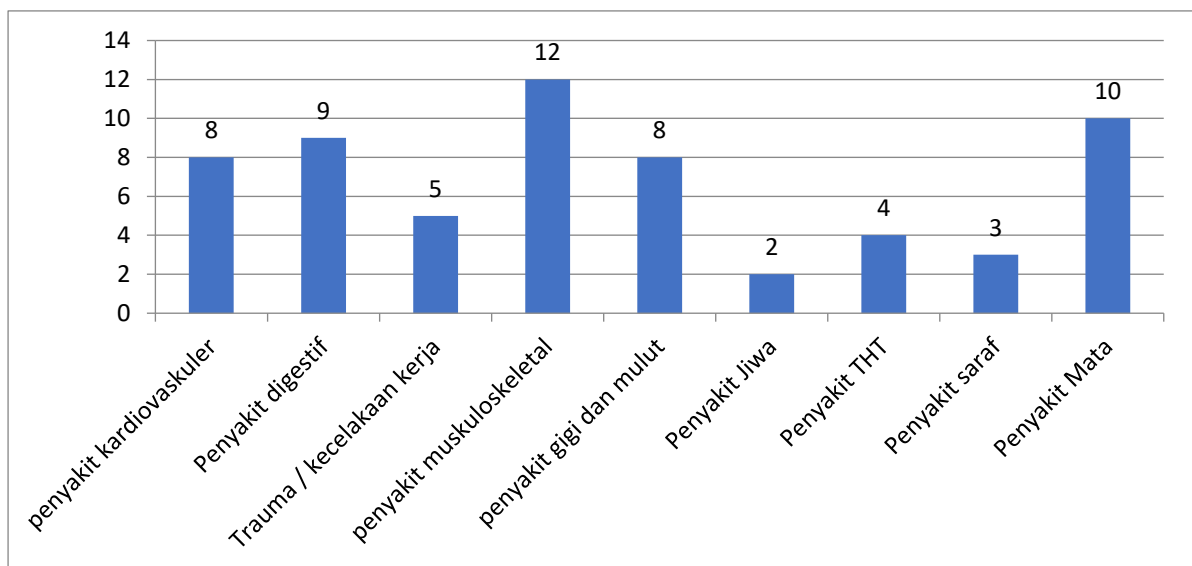
8. Pelayanan Kegawat Daruratan Medik

Kegiatan pelayanan kegawat daruratan medik pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai selama Tahun 2023 sebanyak 61 orang. Adapun kasus gawat daruratnya antara lain penyakit jantung, penyakit saluran cerna, penyakit Hipertensi, Trauma/ kecelakaan kerja, dan sakit gigi. Penanganan dilakukan oleh Dokter dan perawat ke kapal pada saat labuh atau sandar dan penanganan kasusnya dapat dilaksanakan di kapal tanpa harus di rujuk ke Rumah sakit. Terdapat 61 kasus selama tahun 2023. Adapun rincian dapat dilihat di grafik di bawah ini.

GRAFIK PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MEDIK KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DUMAI TAHUN 2023



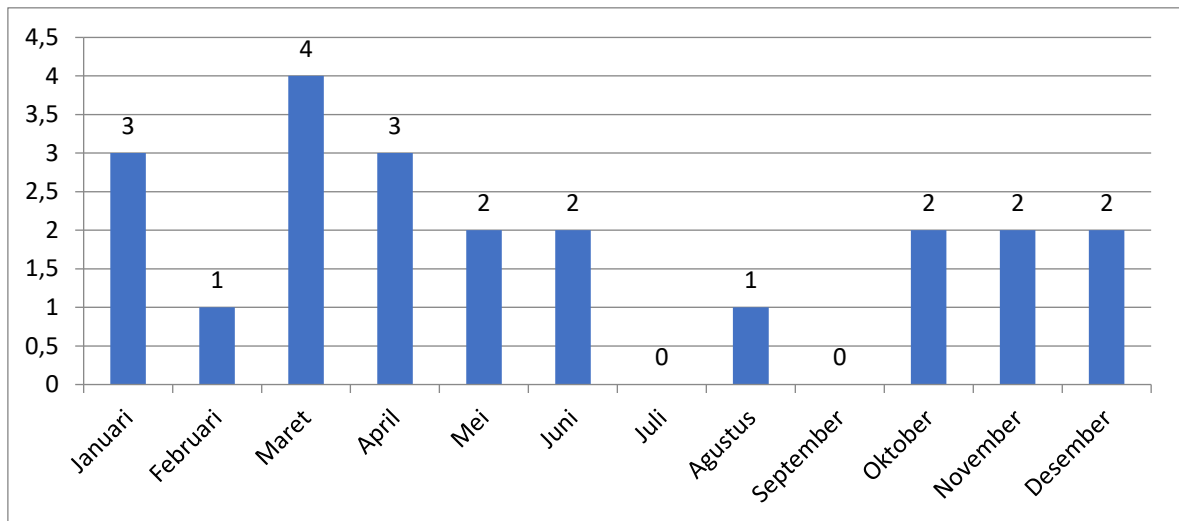
GRAFIK PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN MEDIK BERDASARKAN PENYAKIT PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DUMAI TAHUN 2023



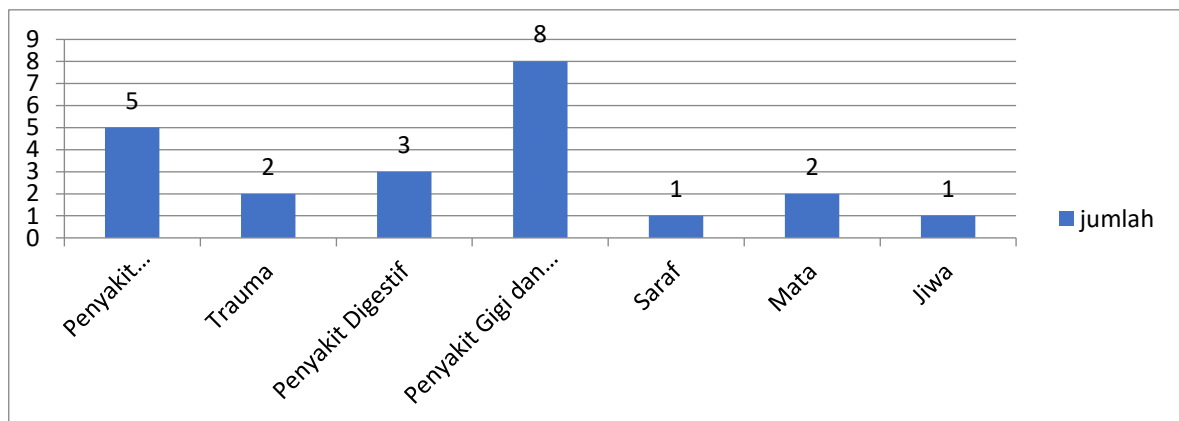
9. Pelayanan Rujukan

Adapun kasus gawat darurat yang ditangani selama tahun 2023 seperti penyakit jantung, trauma atau kecelakaan kerja dan penyakit saluran cerna. Pelaksanaan rujukan dilakukan oleh dokter, perawat dan supir ambulance.

GRAFIK PELAYANAN RUJUKAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DUMAI TAHUN 2023



GRAFIK PELAYANAN RUJUKAN BERDASARKAN PENYAKIT PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DUMAI TAHUN 2023



Kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan oleh Substansi UKLW pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Telah dilakukan layanan kesehatan di Poliklinik KKP Kelas II Dumai selama tahun 2022 sebanyak 47310 orang, pelayanan Imunisasi MM 135, Yellow fever 41, Covid19 46, penerbitan SIAOS 35, penerbitan KIR 266, penerbitan surat layak terbang 0, Layanan deteksi dini HIV dan IMS 837, TBC 849 dan Malaria 150, penanganan gawat darurat 61 kasus dan rujukan 22 layanan.
- Jejaring kerja pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan pihak-pihak terkait di pelabuhan maupun di wilayah sudah terbangun dan berjalan dengan baik.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Subbag Adum adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 adalah 87,62 (BAIK) dari target 86 yang ditentukan satuan kerja. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari penggabungan dari 4 bobot nilai indikator yaitu : Penyerapan dengan nilai 98,22, Konsistensi dengan nilai 99,81, dan CRO dengan nilai 100, serta Efisiensi dengan nilai 2,97.
2. Pada Tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah berhasil mencapai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 97,16 target 96.
3. Pencapaian target peningkatan kompetensi sebanyak 20 jpl untuk ASN dan PPPK 24 jpl pada tahun 2023 adalah 100 % melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Untuk pemenuhan Peningkatan Kompetensi ini terdapat 2 (dua) orang pegawai yang diberikan coaching/mentoring . Pegawai yang telah melakukan peningkatan kompetensi belum ada yang melakukan sharing ilmu kepada pegawai lainnya.
4. Pada Tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah berhasil mencapai target persentase realisasi anggaran (belanja) sebesar 13,256,033,170 (98.22%) dari target dalam perjanjian kinerja kepala kantor Tahun 2023 sebesar 12,821,172,450 (95%).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dalam penilaian laporan keuangan WTP adalah menjaga kualitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan yang akuntabel. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah melakukan desk reviu kiberja implementasi WBK dengan Tim Hukormas Ditjen P2P pada tanggal 29 November 2023 didapatkan nilai kumulatif 85,06.

BAB V

PENUTUP

Perlu ditingkatkan kemampuan dan jumlah petugas dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit seiring dengan meningkatnya volume kegiatan, perlu bimbingan dan monitoring evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja sehingga bisa berjalan dengan lebih baik lagi, jejaring kerja yang sudah berjalan baik dengan pihak terkait di pelabuhan maupun wilayah harus dipertahankan dan ditingkatkan supaya lebih baik lagi.

Agar kegiatan dan pelaporan bisa dilakukan lebih baik sehingga terlaksananya tupoksi dan pelaporan yang lebih baik di masa yang akan datang